



**KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**



LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir
Pada 31 Desember 2017
(Audited)

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

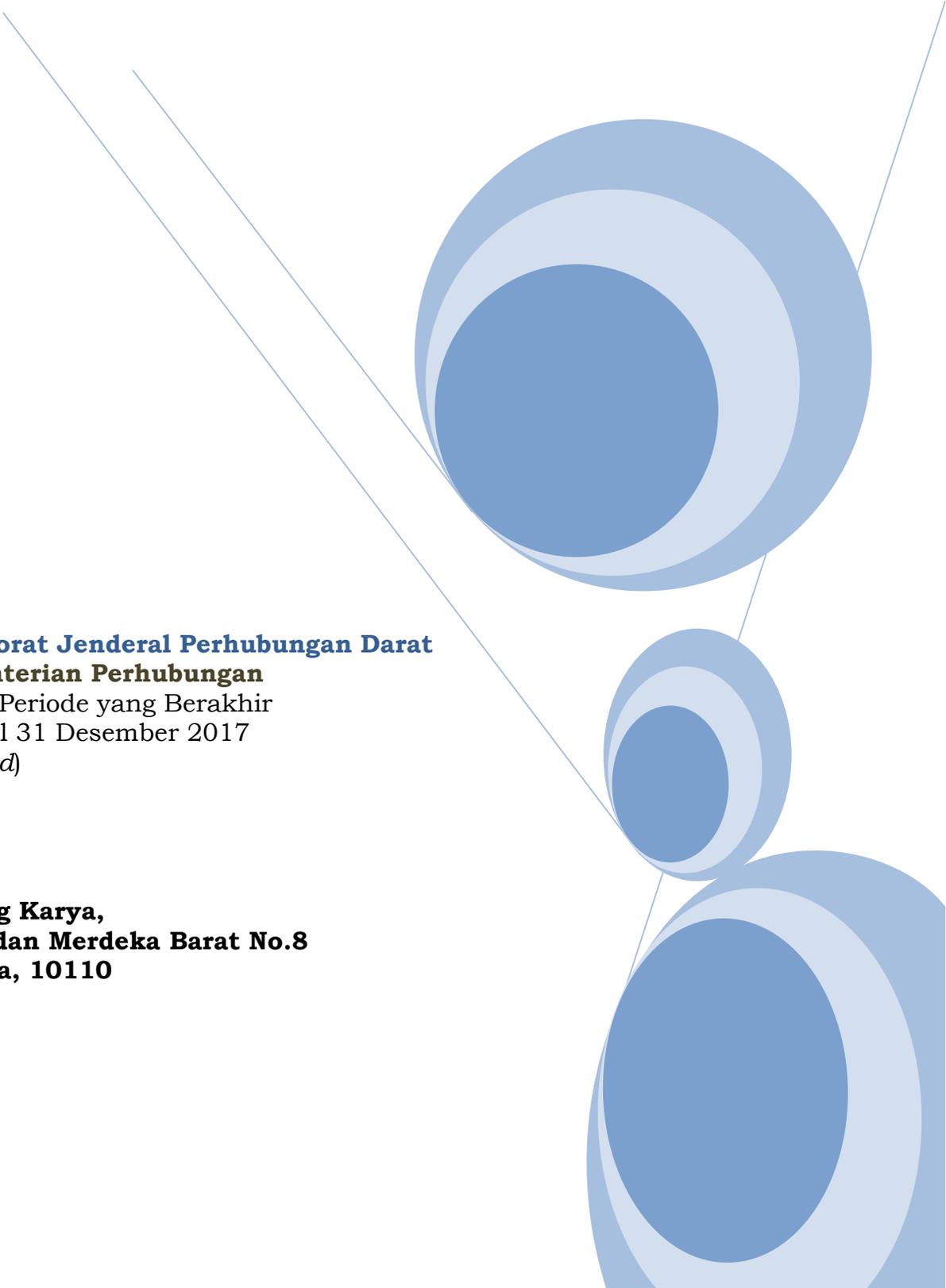
KUALITAS * IKHLAS * NYAMAN * SELAMAT

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017
(*Audited*)

Gedung Karya,

**Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta, 10110**



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan
Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2017
(*Audited*)

Gedung Karya,
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta, 10110

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2018

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si
NRP. 62050784

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
F. Pengungkapan Penting Lainnya	64
VI. Lampiran dan Daftar	86

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2018

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si

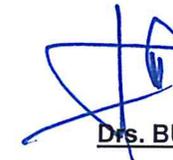
NRP. 62050784

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

NO	URAIAN	2017				2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	500,000,000,000	494,315,366,685	5,684,633,315	99	42,009,502,500	182,621,122,936	(140,611,620,436)	435
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	500,000,000,000	494,315,366,685	5,684,633,315	99	42,009,502,500	182,621,122,936	(140,611,620,436)	435
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	650,175,350,000	295,131,593,636	355,043,756,364	45	95,683,375,000	78,104,899,994	17,578,475,006	82
	BELANJA BARANG	2,002,472,875,000	1,912,790,535,392	89,682,339,608	96	2,042,744,762,000	1,429,374,550,141	613,370,211,859	70
	BELANJA MODAL	1,272,417,545,000	1,260,738,773,780	11,678,771,220	99	1,379,998,788,000	1,329,414,707,431	50,584,080,569	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3,925,065,770,000	3,468,660,902,808	456,404,867,192	88	3,518,426,925,000	2,836,894,157,566	681,532,767,434	81
C	PEMBIAYAAN				0				0

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si
NRP. 62050784

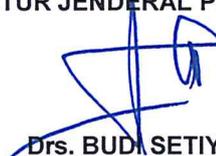
NERACA
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	17,172,626	3,281,206	13,891,420	423.36
Kas di Bendahara Penerimaan	29,099,650	41,182,255	(12,082,605)	(29.34)
Kas Lainnya dan Setara Kas	58,053	13,424,945	(13,366,892)	(99.57)
Piutang Bukan Pajak	15,208,265,514	81,800,900	15,126,464,614	18,491.81
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	15,208,265,514	81,800,900	15,126,464,614	18,491.81
Persediaan	4,496,694,975,978	4,039,441,679,154	457,253,296,824	11.32
JUMLAH ASET LANCAR	4,511,949,571,821	4,039,581,368,460	472,368,203,361	11.69
ASET TETAP				
Tanah	1,334,231,122,875	493,424,519,575	840,806,603,300	170.40
Peralatan dan Mesin	6,145,831,178,138	5,385,311,646,350	760,519,531,788	14.12
Gedung dan Bangunan	3,650,844,217,034	1,334,257,161,893	2,316,587,055,141	173.62
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,603,776,318,205	2,849,999,086,151	2,753,777,232,054	96.62
Aset Tetap Lainnya	349,089,345,689	349,089,345,689	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	281,008,883,815	154,580,369,513	126,428,514,302	81.79
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,787,850,248,891)	(2,173,277,161,623)	(614,573,087,268)	28.28
JUMLAH ASET TETAP	14,576,930,816,865	8,393,384,967,548	6,183,545,849,317	73.67
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	844,310,175,671	714,274,845,561	130,035,330,110	18.21
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	559,920,000	(559,920,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	3,525,973,669,357	3,464,381,275,870	61,592,393,487	1.78
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(623,540,554,865)	(520,608,863,243)	(102,931,691,622)	19.77
JUMLAH ASET LAINNYA	3,746,743,290,163	3,658,607,178,188	88,136,111,975	2.41
JUMLAH ASET	22,835,623,678,849	16,091,573,514,196	6,744,050,164,653	41.91
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	485,014,663	3,153,553,519	(2,668,538,856)	(84.62)
Uang Muka dari KPPN	17,172,626	3,281,206	13,891,420	423.36
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	502,187,289	3,156,834,725	(2,654,647,436)	(84.09)
JUMLAH KEWAJIBAN	502,187,289	3,156,834,725	(2,654,647,436)	(84.09)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	22,835,121,491,560	16,088,416,679,471	6,746,704,812,089	41.94
JUMLAH EKUITAS	22,835,121,491,560	16,088,416,679,471	6,746,704,812,089	41.94
JUMLAH EKUITAS	22,835,121,491,560	16,088,416,679,471	6,746,704,812,089	41.94
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,835,623,678,849	16,091,573,514,196	6,744,050,164,653	41.91

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si
NRP. 62050784

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Halaman : 1

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	481,294,569,342	153,219,453,824	328,075,115,518	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	481,294,569,342	153,219,453,824	328,075,115,518	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	481,294,569,342	153,219,453,824	328,075,115,518	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	295,133,320,820	77,186,642,100	217,946,678,720	-
Beban Persediaan	14,323,652,258	4,301,678,092	10,021,974,166	-
Beban Barang dan Jasa	918,216,497,872	702,919,891,563	215,296,606,309	-
Beban Pemeliharaan	87,340,842,298	60,090,051,630	27,250,790,668	-
Beban Perjalanan Dinas	136,832,517,737	102,642,889,041	34,189,628,696	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

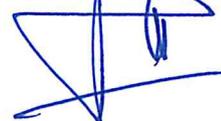
LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Halaman : 2

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	867,689,947,177	407,298,279,685	460,391,667,492	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	2,319,536,778,162	1,354,439,432,111	965,097,346,051	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,838,242,208,820)	(1,201,219,978,287)	(637,022,230,533)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(906,821,648)	(258,494,454,685)	257,587,633,037	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	213,175,498	65,400,000	147,775,498	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,119,997,146	258,559,854,685	(257,439,857,539)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(299,843,676,487)	(344,645,152,240)	44,801,475,753	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	616,665,368,276	277,415,358,031	339,250,010,245	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	916,509,044,763	622,060,510,271	294,448,534,492	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(300,750,498,135)	(603,139,606,925)	302,389,108,790	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,138,992,706,955)	(1,804,359,585,212)	(334,633,121,743)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,138,992,706,955)	(1,804,359,585,212)	(334,633,121,743)	-

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si
NRP. 62050784

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 022
: 03

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	16,088,416,679,471	15,329,083,953,901	759,332,725,570	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,138,992,706,955)	(1,804,359,585,212)	(334,633,121,743)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	5,451,550,680,150	(137,285,784,452)	5,588,836,464,602	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	13,118,773,800	(93,655,488,253)	106,774,262,053	-
SELISIH REVALUASI ASET	5,109,736,691,173	0	5,109,736,691,173	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	328,695,215,177	290,753,675,187	37,941,539,990	-
LAIN-LAIN	0	(334,383,971,386)	334,383,971,386	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,434,146,838,894	2,700,978,095,234	733,168,743,660	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6,746,704,812,089	759,332,725,570	5,987,372,086,519	-
EKUITAS AKHIR	22,835,121,491,560	16,088,416,679,471	6,746,704,812,089	-

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si
 NRP. 62050784

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2017 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp494.315.366.685,- atau mencapai 98,86 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp500.000.000.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp3.468.660.902.808,- atau mencapai 88,37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.925.065.770.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.835.623.678.849,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.511.949.571.821,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.576.930.816.865,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.746.743.290.163,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp502.187.289,- dan Rp22.835.121.491.560,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp481.294.569.342,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.319.536.778.162,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.838.242.208.820,-. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp300.750.498.135,- dan Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.138.992.706.955,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp16.088.416.679.471,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp2.138.992.706.955,- kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp5.451.550.680.150,- dan transaksi antar entitas senilai Rp3.434.146.838.894,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp22.835.121.491.560,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017 (Audited)		% thd Angg	TA 2016 (Audited)
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	500.000.000.000	494.315.366.685	98,86	182.621.122.936
JUMLAH PENDAPATAN		500.000.000.000	494.315.366.685	98,86	182.621.122.936
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	650.175.350.000	295.131.593.636	45,39	78.104.899.994
Belanja Barang	B.4	2.002.472.875.000	1.912.790.535.392	95,52	1.429.374.550.141
Belanja Modal	B.5	1.272.417.545.000	1.260.738.773.780	99,08	1.329.414.707.431
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		3.925.065.770.000	3.468.660.902.808	88,37	2.836.894.157.566

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017 (Audited)	2016 (Audited)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	17.172.626	3.281.206
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	29.099.650	41.182.255
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	58.053	13.424.945
Piutang PNB	C.4	15.208.265.514	81.800.900
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	4.496.694.975.978	4.039.441.679.154
Jumlah Aset Lancar		4.511.949.571.821	4.039.581.368.460
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.334.231.122.875	493.424.519.575
Peralatan dan Mesin	C.15	6.145.831.178.138	5.385.311.646.350
Gedung dan Bangunan	C.16	3.650.844.217.034	1.334.257.161.893
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	5.603.776.318.205	2.849.999.086.151
Aset Tetap Lainnya	C.18	349.089.345.689	349.089.345.689
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	281.008.883.815	154.580.369.513
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2.787.850.248.891)	(2.173.277.161.623)
Jumlah Aset Tetap		14.576.930.816.865	8.393.384.967.548
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	844.310.175.671	714.274.845.561
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.22	-	559.920.000
Aset Lain-Lain	C.23	3.525.973.669.357	3.464.381.275.870
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(623.540.554.865)	(520.608.863.243)
Jumlah Aset Lainnya		3.746.743.290.163	3.658.607.178.188
JUMLAH ASET		22.835.623.678.849	16.091.573.514.196
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	17.172.626	3.281.206
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	485.014.663	3.153.553.519
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		502.187.289	3.156.834.725
JUMLAH KEWAJIBAN		502.187.289	3.156.834.725
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	22.835.121.491.560	16.088.416.679.471
JUMLAH EKUITAS		22.835.121.491.560	16.088.416.679.471
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22.835.623.678.849	16.091.573.514.196

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017 (Audited)	2016 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	481.294.569.342	153.219.453.824
JUMLAH PENDAPATAN		481.294.569.342	153.219.453.824
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	295.133.320.820	77.186.642.100
Beban Persediaan	D.3	14.323.652.258	4.301.678.092
Beban Barang dan Jasa	D.4	918.216.497.872	702.919.891.563
Beban Pemeliharaan	D.5	87.340.842.298	60.090.051.630
Beban Perjalanan Dinas	D.6	136.832.517.737	102.642.889.041
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat			-
	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	867.689.947.177	407.298.279.685
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2.319.536.778.162	1.354.439.432.111
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.838.242.208.820)	(1.201.219.978.287)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		213.175.498	65.400.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(1.119.997.146)	(258.559.854.685)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		616.665.368.276	277.415.358.031
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(916.509.044.763)	(622.060.510.271)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(300.750.498.135)	(603.139.606.925)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.138.992.706.955)	(1.804.359.585.212)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.138.992.706.955)	(1.804.359.585.212)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017 (Audited)	2016 (Audited)
EKUITAS AWAL	E.1	16.088.416.679.471	15.329.083.953.901
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.138.992.706.955)	(1.804.359.585.212)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	13.118.773.800	(93.655.488.253)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	5.109.736.691.173	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	328.695.215.177	290.753.675.187
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	(334.383.971.386)
JUMLAH		5.451.550.680.150	(137.285.784.452)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.434.146.838.894	2.700.978.095.234
EKUITAS AKHIR	E.5	22.835.121.491.560	16.088.416.679.471

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Dasar Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat didirikan sebagai salah satu entitas yang berada di bawah kementerian *Entitas dan* Perhubungan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur *Rencana* dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas berkedudukan di *Strategis* Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas dan fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen dengan visi ***“Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya-saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggung jawabkan.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia;
- Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan;
- Mendorong berkembangannya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel;
- Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2017 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 72 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA/B-E1

NO	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Jenis Kewenangan		
			KP	KD	DK
1	412735	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	√		
2	466570	Direktorat Sarana Perhubungan Darat	√		

3	466941	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	√		
4	445510	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	√		
5	418881	Direktorat Angkutan dan Multimoda	√		
6	439159	Direktorat Pembinaan Keselamatan	√		
7	401692	Satker Perhubungan Darat Provinsi Aceh		√	
8	401693	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara		√	
9	401694	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Barat		√	
10	401697	Satker Perhubungan Darat Provinsi Riau		√	
11	401698	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kepulauan Riau		√	
12	401699	Satker Perhubungan Darat Provinsi Bangka Belitung		√	
13	401701	Satker Perhubungan Darat Provinsi Bengkulu		√	
14	467701	Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi		√	
15	401700	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Selatan		√	
16	401702	Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung		√	
17	606500	Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak		√	
18	401703	Satker Perhubungan Darat Provinsi Banten		√	
19	025734	Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi	√		
20	401704	Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Barat		√	
21	401705	Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Tengah		√	
22	401706	Satker Perhubungan Darat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		√	
23	401707	Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur		√	
24	467702	Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Denpasar		√	
25	606501	Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk		√	

26	401708	Satker Perhubungan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat		√	
27	606502	Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar		√	
28	401711	Satker Perhubungan Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur		√	
29	401712	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat		√	
30	467703	Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palangkaraya		√	
31	401713	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Selatan		√	
32	401714	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Timur		√	
33	606481	Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	√		
34	401717	Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Utara		√	
35	401718	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Selatan		√	
36	401719	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Barat		√	
37	401720	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Utara		√	
38	467704	Balai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu		√	
39	606503	Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana		√	
40	401723	Satker Perhubungan Darat Provinsi Gorontalo		√	
41	603920	Kantor Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	√		
42	401724	Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara		√	
43	401725	Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku		√	
44	401726	Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Utara		√	
45	401727	Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua		√	
46	401728	Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua Barat		√	
47	604126	Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	√		
48	403841	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I		√	

49	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II		√	
50	403843	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III		√	
51	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV		√	
52	403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V		√	
53	403846	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI		√	
54	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII		√	
55	403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII		√	
56	403849	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX		√	
57	403850	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X		√	
58	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI		√	
59	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII		√	
60	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII		√	
61	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV		√	
62	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV		√	
63	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI		√	
64	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII		√	
65	403859	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII		√	
66	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX		√	
67	403861	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX		√	
68	403863	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI		√	
69	403864	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII		√	
70	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII		√	
71	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV		√	

72	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV		√	
Jumlah			10	62	0
Keterangan: KP = Kantor Pusat, KD = Kantor Daerah, DK = Dekonsentrasi					

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung

jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul

hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka

selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan,	25

Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan Operasional dan laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2016 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	500.000.000.000	500.000.000.000
Jumlah Pendapatan	500.000.000.000	500.000.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	726.779.306.000	650.175.350.000
Belanja Barang	2.249.200.016.000	2.002.472.875.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	1.238.460.964.000	1.272.417.545.000
Jumlah Belanja	4.214.440.286.000	3.925.065.770.000

Realisasi

Pendapatan
Rp494.315.366.685,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp494.315.366.685,- atau mencapai 98,86 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,-. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Iuran dan Denda, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	213.761.034	
Pendapatan Jasa	500.000.000.000	473.976.616.243	94,80%
Pendapatan Iuran dan Denda	-	7.329.411.022	
Pendapatan Lain-lain	-	12.795.578.386	
Jumlah	500.000.000.000	494.315.366.685	98,86%

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 170,68 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan jasa dan pendapatan iuran dan denda.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	% NAIK (TURUN)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	213.761.034	83.881.640	154,84
Pendapatan Jasa	473.976.616.243	146.778.514.696	222,92
Pendapatan Iuran dan Denda	7.329.411.022	6.377.484.385	14,93
Pendapatan Lain-lain	12.795.578.386	29.381.242.215	(56,45)
Jumlah	494.315.366.685	182.621.122.936	170,68

Dari nilai realisasi pendapatan jasa sebesar Rp473.976.616.243,- nilai yang cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan sebesar Rp455.966.590.002,- dan Pendapatan Hak dan Perijinan sebesar Rp15.217.190.000,-.

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	% Realiasi Pendapatan
Pendapatan hak dan Perijinan	6.400.000.000	15.217.190.000	237,77
Pendapatan Jasa Tenaga, pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	490.895.000.000	455.966.590.002	92,88
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	2.705.000.000	2.792.805.238	103,25
Pendapatan jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	31.003	-
Jumlah Pendapatan Jasa	500.000.000.000	473.976.616.243	94,80

Realisasi

Belanja
Rp3.468.660.902
.808,-

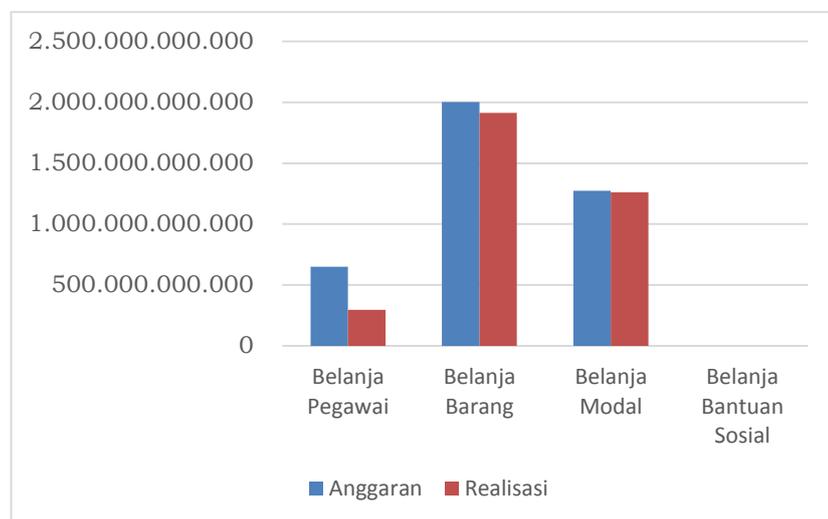
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp3.468.660.902.808,- atau 88,37 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.925.065.770.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017

URAIAN	2017		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	650.175.350.000	295.597.886.771	45,46
Belanja Barang	2.002.472.875.000	1.914.893.796.852	95,63
Belanja Modal	1.272.417.545.000	1.260.834.334.677	99,09
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	3.925.065.770.000	3.471.326.018.300	88,4
Pengembalian Belanja	-	(2.665.115.492)	0
Total Belanja	3.925.065.770.000	3.468.660.902.808	88,4

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 22,27 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	% NAIK (TURUN)
Belanja Pegawai	295.131.593.636	78.104.899.994	277,87
Belanja Barang	1.912.790.535.392	1.429.374.550.141	33,82
Belanja Modal	1.260.738.773.780	1.329.414.707.431	(5,17)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3.468.660.902.808	2.836.894.157.566	22,27

Belanja

Pegawai

Rp295.131.593.636,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp295.131.593.636,- dan Rp78.104.899.994,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,77 persendari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Adanya penambahan pegawai dalam rangka Pengalihan P3D Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang sesuai dengan amanat Undang-Undang.
3. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

AKUN	URAIAN	REALISASI BELANJA 2016 (Audited)	Estimasi Anggaran 2017	REALISASI BELANJA 2017 (Audited)	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6=5/4
51	BELANJA PEGAWAI				
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	36.937.756.659	272.550.559.000	137.890.917.310	50,59%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	527.561	10.023.000	1.952.835	19,48%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.334.380.202	19.542.021.000	10.365.167.190	53,04%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	649.559.775	8.426.386.000	3.154.307.914	37,43%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.425.310.000	39.998.299.000	1.637.820.000	4,09%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	221.175.000	5.576.324.000	194.305.000	3,48%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	332.234.940	5.525.864.000	970.057.544	17,55%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.969.099.800	16.860.174.000	8.221.842.600	48,76%
511129	Belanja Uang Makan PNS	5.615.948.000	32.065.054.000	21.370.589.935	66,65%
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam	10.946.700	368.217.000	-	0,00%
511151	Belanja Tunj. Umum	1.716.135.000	9.213.433.000	7.034.820.000	76,35%
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	-	885.056.000	107.137.000	12,11%
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	51.213.073.637	411.021.410.000	190.948.917.328	46,46%
5122	Belanja Lembur				
512211	Belanja Uang Lembur	1.782.246.000	63.534.714.000	2.370.562.000	3,73%
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1.782.246.000	63.534.714.000	2.370.562.000	3,73%
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito				
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	14.534.240.527	131.404.570.000	101.812.114.308	77,48%
512412	Belanja Pegawai Transito	10.575.339.830	43.869.056.000	-	0,00%
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	25.109.580.357	175.273.626.000	101.812.114.308	58,09%
5132	Belanja Asuransi Kesehatan				
513211	Belanja Askes PNS	-	345.600.000	-	0,00%
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5132	-	345.600.000	-	0,00%
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	78.104.899.994	650.175.350.000	295.131.593.636	45,39%

Belanja Barang

Rp1.912.790.53

5.392,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.912.790.535.392,- dan Rp1.429.374.550.141,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan 33,82 persen dari TA 2016. Hal ini disebabkan karena tingginya kenaikan jumlah belanja barang pada tahun 2017.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	587.777.361.173	423.049.143.338	38,94
Belanja Barang Non Operasional	199.444.115.923	240.346.430.732	(17,02)
Belanja Jasa	83.619.581.638	40.949.053.812	104,20
Belanja Pemeliharaan	87.539.920.178	60.993.293.057	43,52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	136.198.380.772	102.180.444.218	33,29
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.806.168.350	1.900.388.704	(4,96)
Belanja Barang Persediaan	32.711.445.170	3.166.301.162	933,11
Belanja Barang untuk diserahkan kepada M	761.266.923.602	558.943.311.654	36,20
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan l	24.529.900.046	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.914.893.796.852	1.431.528.366.677	33,77
Pengembalian Belanja	2.103.261.460	2.153.816.536	
Jumlah Belanja	1.912.790.535.392	1.429.374.550.141	33,82

Rincian belanja barang persediaan, sebagai berikut

Uraian	Jumlah
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32.711.445.170
Total	32.711.445.170

Rincian belanja barang dan belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat	97.527.735.506
Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	660.081.282.185
Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.657.905.911
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	24.529.900.046
Total	785.796.823.648

Belanja Modal

Rp1.260.738.773.780,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.260.738.773.780,- dan Rp1.329.414.707.431,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar 5,17 persen dibandingkan TA 2016 disebabkan oleh tidak adanya belanja modal tanah pada TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	5.399.178.000	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	481.364.171.441	243.482.658.324	97,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	278.722.027.904	145.699.331.036	91,30
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaring	7.159.847.000	11.051.056.650	(35,21)
Belanja Modal Lainnya	493.588.288.332	924.374.388.153	(46,60)
Jumlah Belanja Kotor	1.260.834.334.677	1.330.006.612.163	(5,20)
Pengembalian	95.560.897	591.904.732	-
Jumlah Belanja	1.260.738.773.780	1.329.414.707.431	(5,17)

Belanja Modal Tanah **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Tanah Rp0,-

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp5.399.178.000,-. Realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	% Naik (Turun)
Belanja Modal Tanah	0	4.817.084.000	(100,00)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	582.094.000	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	5.399.178.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	5.399.178.000	(100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin
Rp481.304.233.775,-

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp481.304.233.775,-, mengalami kenaikan sebesar 98,02 persen bila dibandingkan dengan TA 2016 sebesar Rp243.054.420.425,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	481.364.171.441	240.123.550.374	100,47
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	3.359.107.950	0,00
Jumlah Belanja Kotor	481.364.171.441	243.482.658.324	97,70
Pengembalian	59.937.666	428.237.899	0,00
Jumlah Belanja	481.304.233.775	243.054.420.425	98,02

Belanja Modal Gedung dan Bangunan **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
 Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp278.722.027.904,- dan Rp145.682.428.019,- mengalami kenaikan sebesar 47,73 persen dibandingkan Realisasi TA 2016.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
 TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	271.174.112.404	127.289.795.917	53,06
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.547.915.500	18.409.535.119	0,00
Jumlah Belanja Kotor	278.722.027.904	145.699.331.036	47,73
Pengembalian Belanja Modal	0	16.903.017	0,00
Jumlah Belanja	278.722.027.904	145.682.428.019	47,73

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.124.266.169,- dan Rp11.051.056.650,-. Realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar 35,53 persen dibandingkan TA 2016.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA
 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A 2016	Naik (Turun)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.159.847.000	11.051.056.650	(35,21)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	7.159.847.000	11.051.056.650	(35,21)
Pengembalian Belanja Modal	35.580.831	0	0,00
Jumlah Belanja	7.124.266.169	11.051.056.650	(35,53)

Belanja Modal Lainnya
Rp493.588.245.932,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp493.588.245.932,- dan Rp924.227.624.337,-. Realisasi TA 2017 mengalami penurunan sebesar 87,25 persen dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A 2016	% Naik (Turun)
Belanja <i>Software</i>	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	493.588.288.332	924.374.388.153	(87,28)
Jumlah Belanja Kotor	493.588.288.332	924.374.388.153	(87,28)
Pengembalian Belanja Modal	42.400	146.763.816	0,00
Jumlah Belanja	493.588.245.932	924.227.624.337	(87,25)

Belanja Bantuan Sosial
Rp0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp17.172.626,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp17.172.626,- dan Rp3.281.206,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 dan
2016*

No.	Wilayah	31 Des 2017	31 Des 2016
1	Wilayah DKI Jakarta	Rp 1.186.300	Rp -
2	Wilayah Jawa Barat	Rp -	Rp -
3	Wilayah Jawa Timur	Rp 3.474.391	Rp 3.281.206
4	Wilayah Kalimantan Barat	Rp -	Rp -
5	Wilayah Sulawesi Utara	Rp 10.000.000	Rp -
6	Wilayah Nusa Tenggara Timur	Rp 2.511.935	Rp -
Jumlah		Rp 17.172.626	Rp 3.281.206

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp29.099.650,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp29.099.650,- dan Rp41.182.255,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2017
dan 2016*

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
UPT Kariangu	29.099.650	41.182.255
Jumlah	29.099.650	41.182.255

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp58.053,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp58.053,- dan Rp13.424.945,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2016

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	58.053	13.424.945
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	58.053	13.424.945

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari kas Lainnya di bendahara pengeluaran terdapat pada satker:

Keterangan	Tahun 2017
Balai Pengelola Transportasi Wilayah III	2.019
Balai Pengelola Transportasi Wilayah IV	13.064
Balai Pengelola Transportasi Wilayah XIV	13.625
Balai Pengelola Transportasi Wilayah XVIII	1.520
Balai Pengelola Transportasi Wilayah XX	14.565
Balai Pengelola Transportasi Wilayah XXII	13.260
Jumlah	58.053

Piutang PNPB Rp15.208.265.514,-

C.4 Piutang PNPB

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp15.208.265.514,- dan Rp81.800.900,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2017 dan 2016

Uraian	TH 2017	TH 2016
Piutang PNBP	15,208,265,514	81,800,900
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	15,208,265,514	81,800,900

Saldo Piutang PNBP terdapat pada Satker:

Uraian	TH 2017	TH 2016
Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	18.134.796	-
Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara	15.190.130.718	-
Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa Timur	-	81.800.900
Jumlah	15.208.265.514	81.800.900

Bagian Lancar Tagihan **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR Rp0,- Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Bagian Lancar TPA **C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**

Rp0,- Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0,- Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan piutang tak tertagih–piutang lancar adalah

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2017 dan
2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

*Persediaan
Rp4.496.694.975
.978,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp4.496.694.975.978,- dan Rp4.039.441.679.154,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 Des 2017	31 Des 2016
1	Barang Konsumsi	Rp 35,664,412,722	Rp 1,305,590,012
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 98,425,508	Rp 39,569,500
3	Suku Cadang	Rp 132,500	Rp 132,500
4	Pita Cukai, Meterai, dan Leges	Rp 840,000	Rp 2,254,000
5	Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1,264,264,032,821	Rp 1,473,764,192,064
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1,074,324,153,941	Rp 957,183,860,339
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1,800,603,447,226	Rp 1,318,253,482,013
8	Aset Tetap Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 254,734,500,335	Rp 265,740,952,601
9	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp 1,184,887,000	Rp 1,184,887,000
10	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 2,657,874,500	Rp 2,657,874,500
11	Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (Dalam Proses)	Rp 56,321,983,630	Rp 14,377,642,630
12	Bahan Baku	Rp -	Rp -
13	Persediaan Lainnya	Rp 6,840,285,795	Rp 4,931,241,995
Jumlah		Rp 4,496,694,975,978	Rp 4,039,441,679,154

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Saldo persediaan di Neraca per 31 Desember 2017 memiliki nilai yang cukup besar disebabkan oleh persediaan yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana rincian persediaan terlampir.

*Tagihan
TP/TGR Rp0,-.*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,- **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Non Lancar Rp0,- **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar**
- Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp1.334.231.122.875,- **C.14 Tanah**
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.334.231.122.875,- dan Rp493.424.519.575,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp	493,424,519,575
Mutasi Tambah :			
	Pembelian	Rp	9,195,480,784
	Hibah	Rp	229,606,534,144
	Revaluasi	Rp	566,266,188,435
	Kapitalisasi Pematangan Tanah	Rp	36,293,891,937
Mutasi Kurang :			
	Penghapusan	Rp	-
	Revaluasi	Rp	(555,492,000)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp	1,334,231,122,875
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016		Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2016		Rp	1,334,231,122,875

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berasal dari Pengadaan pada Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat, Hibah dalam kegiatan pengalihan Aset P3D untuk Terminal tipe A dan Jembatan Timbang pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Revaluasi Aset Tetap.

Rincian Hibah Tanah sebagaimana terlampir.

Rincian Revaluasi Aset Tetap Tanah terdapat pada:

No.	Kode Satker	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	412735	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	57,214,912,341
2	025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	489,341,267,000
3	467701	Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi	8,090,670,594
4	467704	Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Palu	1,637,873,500
5	606500	Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak	9,981,465,000
6	606502	Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar	(555,492,000)

Peralatan dan Mesin **C.15 Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.145.831.178.138,- dan Rp5.385.311.646.350,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp	5,385,311,646,350
Mutasi Tambah :			
	Saldo awal	Rp	42,840,000
	Pembelian	Rp	18,312,438,205
	Transfer Masuk	Rp	194,089,791,761
	Hibah (Masuk)	Rp	10,240,734,374
	Penyelesaian Pembangunan dg KDP	Rp	811,615,577,802
	Reklasifikasi Masuk	Rp	457,413,082,861
	Penyelesaian Pembangunan	Rp	203,683,000
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	866,854,816
Mutasi Kurang :			
	Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(1,920,871,987)
	Penghapusan	Rp	(1,801,670,000)
	Transfer Keluar	Rp	(194,089,791,761)
	Reklasifikasi Keluar	Rp	(532,718,521,905)
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	(1,734,615,378)
	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	Rp	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp	6,145,831,178,138

Gedung dan Bangunan **C.16 Gedung dan Bangunan**

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp3.650.844.217.034,- dan Rp1.334.257.161.893,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	1.334.257.161.893
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp	379.153.400
Transfer Masuk	Rp	8.139.795.506
Hibah (Masuk)	Rp	203.025.914.443
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	Rp	191.396.108.579
Reklasifikasi Masuk	Rp	266.581.609.735
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	2.315.543.010
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp	4.421.402.000
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	Rp	1.852.767.827.681
Mutasi Kurang :		
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	(2.705.400)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	(31.978.610.477)
Transfer Keluar	Rp	(8.139.795.506)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(77.675.150.000)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	Rp	(5.090.847.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(633.664.000)
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	Rp	(88.919.526.830)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	3.650.844.217.034

Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada tahun 2017 terdapat pada:

No.	Kode Satker	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	418881	Direktorat Angkutan dan Multimoda	120,249,000
2	418881	Direktorat Angkutan dan Multimoda	(17,226,507,974)
3	445510	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	(23,715,338,228)
4	466941	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	1,829,718,336,167
5	025734	Balai Pengujian Lain Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	598,085,780
6	467701	Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi	4,301,153,000
7	467701	Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi	(24,607,984,272)
8	606481	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	(918,290,622)
9	606481	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	(4,276,311,480)

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.603.776.318.205,-

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.603.776.318.205,- dan Rp2.849.999.086.151,-. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Terdapat mutasi tambah & kurang Jalan dan Jembatan sampai dengan 31 Desember 2017.

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan:

Hibah (Masuk)	10.697.975.700
Penyelesaian Pembangunan Dg KDP	7.344.747.000
Reklasifikasi Masuk	73.845.836.500
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	5.090.847.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	2.339.145.097.671
Jumlah	2.435.764.503.871

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan:

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	135.432.731
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	6.969.514.817
Koreksi Semu Hasil Inventarisasi	23.849.307.368
Reklasifikasi Keluar	6.276.920.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	59.037.857.500
Jumlah	96.269.032.416

Mutasi tambah Irigasi:

Hibah (Masuk)	5.022.672.188
Penyelesaian Pembangunan Dg KDP	21.039.088.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	521.198.937.310
Reklasifikasi Masuk	706.520.892
Jumlah	547.967.218.390

Mutasi kurang Irigasi:

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	73.196.826.277
Koreksi Semu Hasil Inventarisasi	63.986.272.349
Jumlah	137.183.098.626

Mutasi tambah Jaringan:

Hibah (Masuk)	874.640.835
Penyelesaian Pembangunan Dg KDP	2.625.000.000
Jumlah	3.499.640.835

Mutasi kurang Jaringan:

Reklasifikasi Keluar	2.000.000
Jumlah	2.000.000

Revaluasi atas Jalan, Jaringan dan Irigasi dilaksanakan pada tahun 2017 terdapat pada:

No.	Kode Satker	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	445510	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	65.855.400.388
2	466941	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	2.256.908.739.653
3	025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	4.374.881.503
4	467701	Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Jambi	4.837.987.200
5	606481	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	1.018.169.400
6	606481	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	3.340.649.600
7	606481	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	(3.142.075.490)
8	445510	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	79.195.400
9	466941	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	447.757.919.668
10	025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	46.073.171
11	606481	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	118.922.794

Aset Tetap Lainnya
Rp349.089.345.689,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp349.089.345.689,- dan Rp349.089.345.689,-.

Tidak terdapat mutasi tambah & kurang Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2017.

Uraian	Jumlah
Aset Tetap Renovasi	325,618,237,880
Aset Tetap Lainnya	23,471,107,809
JUMLAH	349,089,345,689

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp281.008.883.815,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp281.008.883.815,- dan Rp154.580.369.513,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Perolehan/Penambahan KDP	313.684.784.475
Pengembangan KDP	840.270.651.347
Reklasifikasi Masuk KDP	21.94.770392
Jumlah	1.175.860.206.214

Mutasi Kurang:

Koreksi Nilai KDP	27.778.536
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	1.048.291.398.665
Koreksi Pencatatan Nilai	1.112.514.711
Jumlah	1.049.431.691.912

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp2.787.850.248.891,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp2.787.850.248.891,- dan Rp2.173.277.161.623,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 1.334.231.122.875	Rp -	Rp 1.334.231.122.875
2	Peralatan dan Mesin	Rp 6.145.831.178.138	Rp 2.282.908.824.575	Rp 3.862.922.353.563
3	Gedung dan Bangunan	Rp 3.650.844.217.034	Rp 145.608.084.914	Rp 3.505.236.132.120
4	Jalan, Irigasi, dan Jarir	Rp 5.603.776.318.205	Rp 359.318.339.402	Rp 5.244.457.978.803
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 339.089.345.689	Rp 15.000.000	Rp 339.074.345.689
Jumlah		Rp 17.073.772.181.941	Rp 2.787.850.248.891	Rp 14.285.921.933.050

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tak

Berwujud

Rp844.310.175.6

71,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp844.310.175.671,- dan Rp714.274.845.561,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2017

No.	Uraian	Nilai
1.	Software	Rp 7,077,503,640
2.	Hasil Kajian/Penelitian	Rp 301,875,338,830
3.	Paten	Rp 23,167,000
4.	Lisensi	Rp 306,955,000
5.	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 535,027,211,201
Jumlah		Rp 844,310,175,671

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	714,274,845,561
Mutasi Tambah :		
Software		
Penyelesaian Pembangunan Dg KDP	Rp	99,517,000
Hasil Kajian/Penelitian		
Hibah (Masuk)	Rp	41,925,000
Penyelesaian Pembangunan Dg KDP	Rp	91,603,645,410
Reklasifikasi Masuk	Rp	6,109,448,180
Aset Tak Berwujud Lainnya		
Transfer Masuk	Rp	691,155,500
Hibah (Masuk)	Rp	42,640,000
Penyelesaian Pembangunan Dg KDP	Rp	35,073,697,800
Reklasifikasi Masuk	Rp	1,097,099,900
Mutasi Kurang :		
Aset Tak Berwujud Lainnya		
Transfer Keluar	Rp	(691,155,500)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(4,032,642,680)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	844,310,176,171
Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	Rp	(5,107,648,379)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	839,202,527,792

Rincian aset tak berwujud disajikan pada lampiran.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Rp0,-

C.22 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan merupakan Aset Tak Berwujud yang perolehan atau penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp0,- dan Rp559.920.000,-.

Aset Lain-Lain
Rp3.525.973.669.357,-

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp3.525.973.669.357,- dan Rp3.464.381.275.870,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset lain-lain terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan

dalam operasi pemerintah dengan saldo sebesar Rp3.349.932.432.867,- dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional dengan saldo sebesar Rp176.041.236.490,-.

*Rincian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi
pemerintah T.A.2017*

No.	Uraian	Nilai
1.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 3.320.300.018.867
2.	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp 205.673.650.490
Jumlah		Rp 3.525.973.669.357,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	Rp	3.464.381.275.870
Mutasi Tambah :		
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	Rp	61.592.393.487
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi Kurang :		
Penghapusan BMN	Rp	-
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yg dihentikan)	Rp	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	3.525.973.669.357
Amortisasi s.d. 31 Desember 2016	Rp	(618.593.672.336)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	Rp	2.907.379.997.021

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp623.540.554
.865,-*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp623.540.554.865,- dan Rp520.608.863.243,-. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	Rp 843,962,370,671	Rp 5,107,648,079	Rp 838,854,722,592
B.	Aset Lainnya	Rp 3,525,973,669,357	Rp 618,432,906,786	Rp 2,907,540,762,571
Total		Rp 4,369,936,040,028	Rp 623,540,554,865	Rp 3,746,395,485,163

Uang Muka **C.25 Uang Muka dari KPPN**

dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017 dan Rp17.172.626,- 2016 masing-masing sebesar Rp17.172.626,- dan Rp3.281.206,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga **C.26 Utang kepada Pihak Ketiga**

Rp485.014.663 Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan Rp3.153.553.519,- 2016 masing-masing sebesar Rp485.014.663,- dan Rp3.153.553.519,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Deputy Administrasi, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 2,627,184
2.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 277,956,415
3.	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	Rp 204,418,000
4.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 13,064
Total		Rp 485,014,663

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar terdapat pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi senilai Rp2.627.184,-;
- b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar terdapat pada :
 - Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp26.999.650,-;
 - Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp232.375.000,-; dan
 - Pelabuhan Penyeberangan Kariangu senilai Rp18.581.765,-.
- c. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar terdapat pada :
 - Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp158.418.000,-;
 - Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku senilai Rp46.000.000,-;
- d. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV senilai Rp13.064,-

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp0,-*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

*Beban yang
Masih harus
Dibayar Rp0,-*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas

C.29 Ekuitas

Rp22.835.121.491.560,-

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp22.835.121.491.560,- dan Rp16.088.416.679.471,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp481.294.569
.342,-

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp481.294.569.342,- dan Rp153.219.453.824,-. Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 214,12 persen dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (Turun)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan			
Pendapatan Penjualan Lainnya	-	400.000	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	585.536	18.081.640	(96,76)
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	585.536	18.481.640	(196,76)
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Hak Dan Perijinan	15.217.190.000	9.574.245.001	58,94
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	455.966.590.002	134.258.525.000	239,62
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	2.780.722.633	2.948.947.226	(5,70)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	70.049	79.817	(12,24)
Jumlah Pendapatan Jasa	473.964.572.684	146.781.797.044	280,61
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi			
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara		41.690.400	-
Jumlah Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	-	41.690.400	-
Pendapatan Denda			
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	7.329.411.022	6.377.484.385	14,93
Jumlah Pendapatan Denda	7.329.411.022	6.377.484.385	-
Pendapatan Lain-Lain			
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	100	355	(71,83)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	100	355	(71,83)
Jumlah	481.294.569.342	153.219.453.824	214,12

Beban

Pegawai

Rp295.133.320.820,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp295.133.320.820,- dan Rp77.186.642.100,-.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	% NAIK (TURUN)
Beban Gaji Pokok PNS	137.912.037.020	36.941.150.959	273,33
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(19.037.110)	(298.600)	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	1.954.900	536.268	264,54
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(2.065)	(8.664)	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	10.365.340.170	2.334.689.772	343,97
Beban Tunj. Anak PNS	3.154.364.518	649.683.603	385,52
Beban Tunj. Struktural PNS	1.642.300.000	1.425.310.000	15,22
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(4.480.000)	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	195.130.000	221.175.000	(11,78)
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(510.000)	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	970.057.544	332.281.231	191,94
Beban Tunj. Beras PNS	8.221.842.600	1.969.378.840	317,48
Beban Uang Makan PNS	21.369.689.935	5.021.006.000	325,61
Beban Tunjangan Umum PNS	7.040.080.000	1.719.910.000	309,33
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(5.260.000)	(3.590.000)	-
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	107.137.000	10.946.700	878,72
Beban Uang Lembur	2.370.562.000	1.782.246.000	33,01
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	102.249.118.268	14.968.224.890	583,11
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(437.003.960)	(761.339.729)	(42,60)
Beban Pegawai Transito	-	10.575.339.830	-
Jumlah	295.133.320.820	77.186.642.100	282,36

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban

Persediaan

Rp14.323.652.258,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14.323.652.258,- dan Rp4.301.678.092,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	% NAIK (TURUN)
Beban Persediaan Konsumsi	13.268.433.490	4.149.571.365	219,75
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	39.566.962	15.114.620	161,78
Beban Persediaan Bahan Baku	230.571.297	125.461.107	83,78
Beban Persediaan Lainnya	785.080.509	11.531.000	6.708,43
Jumlah	14.323.652.258	4.301.678.092	232,98

Beban Barang

dan Jasa

Rp918.216.497.872,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp918.216.497.872,- dan Rp702.919.891.563,-. Beban Barang dan Jasa pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 30,63 persen dibandingkan dengan TA 2016.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2017 dan TA 2016*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	122.148.990.448	13.310.061.809	817,72
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(18.903.018)	-	-
Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.075.221.800	883.075.000	21,76
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.234.048.129	480.885.700	1196,37
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	(19.363.800)	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	303.958.685	116.699.851	160,46
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	(197.150)	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	12.681.567.500	9.686.509.362	30,92
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(2.770.000)	(22.410.000)	-
Beban Barang Operasional Lainnya	440.181.174.611	398.406.113.028	10,49
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(295.262.061)	-	-
Beban Bahan	11.273.590.175	5.376.590.517	109,68
Pengembalian Beban Bahan	(2.060.000)	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	21.952.980.037	13.535.834.695	62,18
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(7.379.000)	(38.666.000)	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	166.427.827.211	218.572.276.787	(23,86)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(478.015.890)	-	-
Beban Langganan Listrik	10.445.204.810	1.942.437.060	437,74
Pengembalian Beban Langganan Listrik	(45.802.128)	-	-
Beban Langganan Telepon	414.705.927	537.730.152	(22,88)
Pengembalian Beban Langganan Telepon	(96.419)	-	-
Beban Langganan Air	389.718.407	196.449.177	98,38
Pengembalian Beban Langganan Air	(215.000)	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.837.390.220	1.093.296.615	159,53
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(44.279.909)	-	-
Beban Jasa Konsultan	1.309.640.000	-	-
Beban Sewa	25.834.533.890	30.070.515.890	(14,09)
Pengembalian Beban Sewa	(10.000.000)	-	-
Beban Jasa Profesi	3.919.065.000	3.112.850.000	25,90
Beban Jasa Lainnya	38.468.590.822	4.161.641.245	824,36
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	52.913.038.485	1.089.763.175	4755,46
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	104.572.090	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	225.024.000	408.237.500	(44,88)
Jumlah	918.216.497.872	702.919.891.563	30,63

Beban Pemeliharaan
Rp87.340.842.298,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp87.340.842.298,- dan Rp60.090.051.630,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2017 dan TA 2016*

Uraian	TH 2017	TH 2016	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.716.609.548	8.627.501.095	105,35
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(7.508.240)	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	185.579.766	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.402.818.439	30.938.330.888	30,59
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(7.380.000)	(11.033.827)	-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	277.688.013	129.680.842	114,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.600.760	891.926.695	(72,46)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Lainnya	-	(538.840.837)	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	27.995.199.980	19.463.728.400	43,83
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	83.869.866	66.652.982	25,83
Beban Persediaan suku cadang	633.943.932	336.525.626	88,38
Jumlah	87.340.842.298	60.090.051.630	45,35

Beban Perjalanan Dinas
Rp136.832.517.737,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp136.832.517.737,- dan Rp102.642.889.041,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	% NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	107.854.445.027	86.284.303.419	25,00
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(1.127.228.845)	(1.389.491.021)	(18,87)
Beban Perjalanan Tetap	197.856.390	240.809.175	(17,84)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.872.492.034	1.418.382.050	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(24.200.000)	(1.500.000)	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.933.029.482	1.412.183.244	178,51
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	(600.000)	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.332.555.299	12.832.768.870	27,27
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(12.600.000)	(17.681.600)	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.806.168.350	1.900.388.704	(4,96)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	(36.673.800)	-
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	136.832.517.737	102.642.889.041	33,31

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Deputy Administrasi BAPK bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

*Beban Bantuan
Sosial
Rp0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang

atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan dan Amortisasi Rp867.689.947.177,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp867.689.947.177,- dan Rp407.298.279.685,-. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	678,380,277,195	269,593,331,649	151.63
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31,557,294,686	20,789,662,047	51.79
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	30,753,905,912	23,938,790,435	28.47
Beban Penyusutan Irigasi	26,891,426,295	52,903,757,903	(49.17)
Beban Penyusutan Jaringan	222,305,259	330,807,252	(32.80)
Beban Amortisasi Paten	2,316,700	2,316,700	-
Beban Amortisasi Software	1,348,318,459	1,475,879,332	(8.64)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	98,534,102,671	38,263,734,367	157.51
Jumlah	867,689,947,177	407,298,279,685	113.04

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak tertagih Rp0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional **D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Rp300.750.498.135,- Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	% NAIK (TURUN)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	213,175,498	65,400,000	-
Beban Penjualan Aset Non Lancar	(1,119,997,146)	(258,559,854,685)	(99.57)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	616,665,368,276	277,415,358,031	122.29
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(916,509,044,763)	(622,060,510,271)	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(300,750,498,135)	(603,139,606,925)	(50.14)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp16.088.416.679.471,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp16.088.416.679.471,- dan Rp15.329.083.953.901,-.

Defisit LO

Rp2.138.992.706.955,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp2.138.992.706.955,- dan Rp1.804.359.585.512,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/

Kesalahan Mendasar

Rp0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp0,-.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0,-

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp13.118.773.800,-

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp13.118.773.800,- dan Rp(93.655.488.253),-. Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017

antara lain koreksi nilai persediaan pada Satker Sarana Perhubungan Darat.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Uraian	Nilai
Barang Konsumsi	13.118.773.800
Jumlah	13.118.773.800

Dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Nilai
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	3.000
Direktorat Sarana Perhubungan Darat	12.943.870.800
Direktorat Pembinaan Keselamatan	174.900.000
Jumlah	13.118.773.800

*Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp5.109.736.691.173,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.109.736.691.173,- dan Rp0,-. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp328.695.215.177,-*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp328.695.215.177,- dan Rp290.753.675.187,-. Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Aset Tetap sebesar Rp331.214.617.407,- dan Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp(2.519.402.230),- yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lainnya Rp0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0,- dan Rp(334.383.971.386),-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas

pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp3.434.146.838.894

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.434.146.838.894,- dan Rp2.700.978.095.234,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	494.315.366.685
Ditagihkan ke Entitas Lain	(3.468.660.902.808)
Transfer Masuk	175.453.675.745
Transfer Keluar	(175.453.675.745)
Pengesahan Hibah Langsung	(459.801.302.771)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(3.434.146.838.894)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) Rp
494.315.366.685,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Rp3.468.660.902.808,-

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp494.315.366.685,- sedangkan DKEL sebesar Rp3.468.660.902.808,-.

Transfer Masuk
Rp175.453.675.745,-

Transfer Keluar
Rp175.453.675.745,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp175.453.675.745,-. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp175.453.675.745,-.

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar akan dijelaskan lebih lanjut pada lampiran.

*Pengesahan Hibah
Langsung*
Rp459.801.302.771
dan Pengembalian
Pengesahan Hibah
Langsung Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp459.801.302.771,-. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp0,-.

UNIT KERJA			BENTUK HIBAH	NILAI
Sekretariat	Direktorat	Jenderal	Barang	459.801.302.771
Perhubungan Darat				
Jumlah				459.801.302.771

Ekuitas Akhir
Rp22.835.121.491.560,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp22.835.121.491.560,- dan Rp16.088.416.679.471,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Perubahan Struktur Organisasi dan Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, pada Tahun 2017 telah dibentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi, yaitu sebagai berikut:

1. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh di Banda Aceh
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara di Medan
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumatera Barat di Padang
4. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru
5. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi di Jambi
6. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung
7. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di Palembang
8. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Banten di Serang
9. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat di Bandung
10. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Semarang
11. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur di Surabaya

12. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali dan NTB di Denpasar
13. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII NTT di Kupang
14. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Kalimantan Barat di Pontianak
15. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalimantan Selatan di Banjarmasin
16. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalimantan Tengah di Palangkaraya
17. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Balikpapan
18. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara di Kendari
19. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar
20. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulawesi Tengah di Palu
21. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Gorontalo di Gorontalo
22. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Sulawesi Utara di Manado
23. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku di Ambon
24. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Maluku Utara di Ternate
25. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Papua dan Papua Barat di Sorong

F.2 PENGALIHAN PERSONIL PERALATAN PENDANAAN DAN DOKUMEN (P3D)

Berkaitan dengan Pencatatan Aset untuk Aset-Aset Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang sesuai hasil rapat tanggal 15 Desember 2016 tentang Pencatatan Aset Terminal Tipe A dan UPPKB ke dalam Aset Ditjen Perhubungan Darat, berikut langkah-langkah yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait (Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat), Pencatatan Aset Pengalihan Terminal Tipe A dan UPPKB :

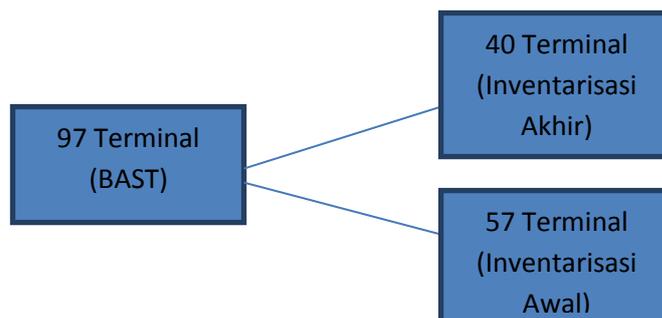
1. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) Pencatatan Aset dilakukan apabila terjadi perpindahan hak kepemilikan yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima. Sesuai dengan PM No 24 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pencatatan Aset dilakukan apabila telah mendapatkan nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut pada poin 1, disepakati pencatatan aset terkait dengan P3D ke dalam Neraca Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilakukan setelah mendapatkan nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Paling lambat pencatatan tersebut dilakukan pada Semester I tahun 2017.
3. Pencatatan atas aset Barang Milik Negara tersebut dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai wajar.

4. Data dukung bukti kepemilikan untuk Tanah berupa Sertifikat, Gedung dan Bangunan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Apabila terdapat kekurangan dan atau bukti kepemilikan tidak dapat dilengkapi maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan/ Kecamatan/Pemilik atau Instansi terkait (Pihak Pemberi).
5. Terkait Berita Acara Serah Terima yang belum selesai ditandatangani, maka pencatatan belum dapat dilakukan sampai proses administrasi selesai.
6. Apabila belum terdapat nilai perolehan atau nilai wajar maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar berkoordinasi dengan Direktorat Penilaian DJKN untuk dilakukan penilaian atas aset dimaksud.

Sampai dengan 31 Desember 2017, posisi aset P3D untuk Terminal Tipe A dan UPPKB dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terminal Tipe A

Jumlah Terminal Tipe A yang sudah dilakukan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Perhubungan sejumlah 97 Terminal. Dari 97 Terminal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



- a. Dari 40 (empat puluh) Terminal yang sudah dilakukan verifikasi akhir dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) 15 (Lima belas) terminal sudah terbit BAST antara Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat, sudah tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara sampai dengan 31 Desember 2017 dan sudah mendapat

nomer Register Hibah dari Kementerian Keuangan. 15 Terminal yang sudah tercatat di dalam Laporan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai yg diserahkan	Nomer Register
1	Terminal Induk Lumpue Kota Pare-Pare	12.445.784.804	26QSZLTA
2	Terminal Pacitan Jawa Timur	5.249.033.597	2YRS8HSA
3	Terminal Bangkalan Jawa Timur	16.053.126.800	2R65ZVUA
4	Terminal Tawalangun Jember	13.826.425.250	2D7NVBZA
5	Terminal Tirtonadi	125.728.862.653	2LB1X4SA
6	Terminal Simpang Aur Sumbar	8.300.859.745	21VH39NA
7	Terminal Batoh Banda Aceh	47.078.565.000	21QYQRFA
8	Terminal Payung Sekaki Pekanbaru	58.491.289.710	2EWEJSLA
9	Terminal Alam Barajo Jambi	12.844.687.789	2EK2U35A
10	Terminal Harjamukti Cirebon	45.481.116.450	2TFW134A
11	Terminal Bobot Sari Jateng	3.829.045.560	2H32ESZA
12	Terminal Arjosari Malang	25.261.085.774	2CD5CD1A
13	Terminal Sumer Payung Sumbawa	12.647.861.152	2TCBENAA
14	Terminal Samarinda Seberang	5.014.763.330	2NASUEKA
15	Terminal Betung Banyuasin Sumsel	6.067.215.500	2ZT3URVA

- 2) 15 (lima belas) terminal sudah tandatangan BAST P3D antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah, namun belum tercatat di dalam Laporan Barang Milik Negara karena belum ada BAST antara Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari:

No	Uraian
1	Terminal Rajabasa
2	Terminal Ciakar
3	Terminal Simpang Nangka
4	Terminal Cepu
5	Terminal Bawen
6	Terminal Induk Pemalang

7	Terminal Tingkir
8	Terminal Giriadipura
9	Terminal Gunung Simpang
10	Terminal Ir. Soekarno
11	Terminal Kembang Putih
12	Terminal Surodakan
13	Terminal Mengwi
14	Terminal Boroko
15	Terminal Tangkoko

3) 10 (sepuluh) Terminal belum tandatangan kedua belah pihak BAST P3D antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

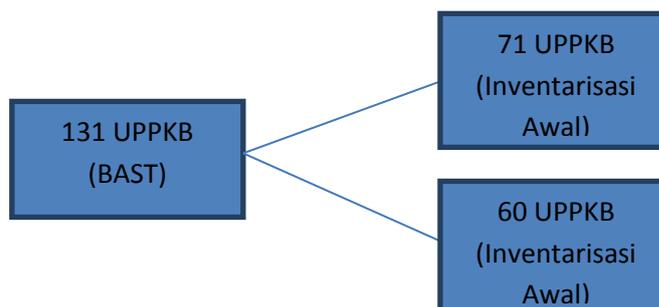
No	Uraian
1	Terminal Tamanan
2	Terminal Bayuangga
3	Terminal Arya Wiraraja
4	Terminal Patria
5	Terminal Surodakan
6	Terminal Pakupatan
7	Terminal Gambut Barakat
8	Terminal Tanjung Pinggir
9	Terminal Kertonegoro
10	Terminal Gayatri

b. Dari 57 (lima puluh tujuh) terminal yang baru melakukan verifikasi awal dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) terminal terkendala dalam masalah teknis dalam perkara hukum dan perubahan penlok;
- 2) 15 (lima belas) terminal dalam proses pemecahan sertifikat;
- 3) 2 (dua) terminal dalam status pinjam pakai; dan
- 4) 38 (tiga puluh delapan) terminal tidak ada sertifikat.

2. UPPKB/Jembatan Timbang

Jumlah UPPKB yang sudah dilakukan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Perhubungan sejumlah 131 UPPKB. Dari 131 UPPKB tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



a. Dari 71 UPPKB yang sudah dilakukan verifikasi akhir dapat dirinci sebagai berikut:

1) 19 (sembilan belas) UPPKB sudah terbit BAST antara Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat, sudah tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara sampai dengan 31 Desember 2017 dan sudah mendapat nomer Register Hibah dari Kementerian Keuangan. 19 UPPKB yang sudah tercatat di dalam Laporan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai yg diserahkan	Nomer Register
1	UPPKB Seumadam Aceh	3.112.978.420	2VTUN4MA
2	UPPKB Jontor Aceh	3.217.644.985	2C1V7FDA
3	UPPKB Kulwuru DI. Yogyakarta	21.315.449.192	2AHN9U6A
4	UPPKB Kalitirto DI. Yogyakarta		
5	UPPKB Taman Martani DI. Yogyakarta		
6	UPPKB Lubuk Buaya Sumbar	9.148.635.619	2ZBGTNAA
7	UPPKB Sitangkai		
8	UPPKB Kubu Kerambil		
9	UPPKB Sungai Lansek		
10	UPPKB Kamang		
11	UPPKB Lubuk Selasih		
12	UPPKB Tanjung Balik		
13	UPPKB Beringin Pasaman		
14	UPPKB Air Haji	1.043.494.000	21QELQJA
15	UPPKB Way Urang Lampung		
16	UPPKB Simpang Pematang		
17	UPPKB Blambang Umpu	7.581.011.241	2GH92K7A
18	UPPKB Liang Anggang		
19	UPPKB Kintap		

2) 33 (tiga puluh tiga) UPPKB sudah tandatangan BAST P3D antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah, namun belum tercatat di dalam Laporan Barang Milik Negara karena belum ada BAST antara Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat.

3) 19 (sembilan belas) Terminal belum tandatangan kedua belah pihak BAST P3D antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah.

- b. Dari 60 (enam puluh) UPPKB yang baru melakukan verifikasi awal dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) 8 (delapan) UPPKB sudah memiliki sertifikat asli, namun rincian aset belum lengkap;
 - 2) 19 (sembilan belas) UPPKB sertifikat masih fotocopy dan rincian aset belum lengkap;
 - 3) 26 (dua puluh enam) terminal tidak ada sertifikat;
 - 4) 7 (tujuh) UPPKB status pinjam pakai.

F.3 KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) *“Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.”*
- (2) *“Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”*

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset tetap:

1. Tanah,
2. Gedung dan Bangunan,
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:
 - a. Jalan dan jembatan; dan
 - b. Bangunan Air.

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN

yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN yang dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-761/Mk.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilain dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei untuk objek penilaian selain Tanah.

Untuk Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai 2017 dan selesai tahun 2018. Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebanyak 10 (sepuluh) Satker, meliputi:

1. Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari 1 NUP;
2. Satuan Kerja Direktorat Angkutan dan Multimoda terdiri dari 10 NUP;

3. Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat terdiri dari 18 NUP;
4. Satuan kerja Direktorat Prasarana Perhubungan Darat terdiri dari 25 NUP;
5. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor terdiri dari 62 NUP;
6. Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan terdiri dari 37 NUP;
7. UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangu terdiri dari 20 NUP;
8. Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan terdiri dari 1 NUP;
9. Kantor Otoritaas Pelabuhan Penyeberangan Lembar terdiri dari 1 NUP;
10. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak terdiri dari 1 NUP.

telah melakukan Penilaian Kembali BMN yang terdiri dari 176 (seratus tujuh puluh enam) NUP dengan total nilai kenaikan/(penurunan) nilai BMN sebesar Rp5.106.412.984.563,- yang berasal dari nilai buku tercatat (administrasi) sebesar Rp1.284.195.426.437,- dan nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp6.390.608.411.000,-.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017

1. Hasil Penilaian Kembali BMN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap yang dilakukan tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) BMN, terdapat kenaikan/penurunan nilai BMN objek Penilaian Kembali BMN pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp5.106.412.984.563 dengan rincian terlampir.

2. Koreksi Penilaian Kembali BMN

Terhadap hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut di atas, telah dilakukan koreksi ke dalam aplikasi SIMAK BMN oleh masing-masing Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan total nilai koreksi sebesar Rp5.110.899.951.093 dengan rincian terlampir.

Kesesuaian LHIP dan Koreksi

Berdasarkan data hasil Penilaian Kembali BMN dan koreksi yang telah dilakukan tersebut di atas, menunjukkan bahwa kenaikan/penurunan nilai BMN atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat seluruhnya telah dilakukan tindak lanjut melalui koreksi dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna melalui aplikasi SIMAK BMN sesuai LHIP.

No	Uraian Akun	Kenaikan / (Penurunan)	Koreksi dalam SIMAK BMN	Selisih
1.	Tanah	565.544.600.425	565.544.600.425	-
2.	Bangunan	1.760.458.936.969	1.760.458.936.969	-
3.	Jalan, Jembatan, Bangunan Air	2.780.409.447.169	2.780.409.447.169	-
Total		5.106.412.984.563	5.106.412.984.563	-

1. Kesesuaian Koreksi Hasil Penilaian Kembali BMN Dalam Laporan Keuangan

Koreksi atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap yang dilakukan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan melalui aplikasi SAIBA sampai dengan posisi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.110.899.951.093,- dengan rincian terlampir.

2. Catatan atas Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

Dalam pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat BMN yang tidak ditemukan sebanyak 25 NUP dengan nilai buku sebesar Rp8.763.278.010,- dengan rincian terlampir.

F.4 TRANSFER KELUAR-TRANSFER MASUK

Sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat beberapa transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk yang terjadi pada beberapa satker daerah yang asetnya yang diserahterimakan ke Balai LLAJSDP dan Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat dan aset dari Direktorat Pembinaan Keselamatan yang diserahterimakan ke Balai LLAJSDP. Berikut ini transaksi keluar dan transfer keluar yang terjadi selama Semester 1 Tahun 2017.

1. Transfer masuk aset-aset Fasilitas Keselamatan Jalan yang diserahterimakan ke Balai LLAJSDP
 - a. Transfer Masuk ke Balai LLAJSDP Kalimantan Tengah
 - b. Transfer Masuk ke Balai LLAJSDP Jambi
 - 1) Satker Perhubungan Darat Sumatera Barat sesuai dengan BASTO Nomor KU.403/SK.DARAT-SB/173/PHB-2017 tanggal 13 Pebruari 2017 berupa Rambu Jalan sebanyak 13 unit senilai Rp20.543.047.000,-.
 - 2) Satker Perhubungan Darat Riau sesuai dengan BASTO Nomor 01/BASTO-FASKES/SPD-RIAU/I/2017 Tanggal 30 Januari 2016 berupa Rambu-rambu sebanyak 13 unit senilai Rp35.384.594.000,-.
 - 3) Satker Perhubungan Darat Sumatera Selatan sesuai dengan BASTO Nomor KU.003/1/3/BAP/HUBDAT-SUMSEL/2017 tanggal 21 Maret 2017 berupa:

- a) Rambu Jalan sebanyak 4.648 unit senilai Rp8.248.866.715,-;
 - b) Paku Jalan sebanyak 304 unit senilai Rp91.310.000,-;
 - c) Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebanyak 114 unit senilai Rp5.592.283.282,-;
 - d) Guardrail sebanyak 1.200 unit senilai Rp1.134.268.400,-.
- 4) Satker Perhubungan Darat Bangka Belitung sesuai dengan BASTO Nomor 01/BASTO/FASKES/PPKLLAJ/PPD.BABEL/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 berupa Rambu Jalan sebanyak 8 unit senilai Rp9.534.427.500,-.
- c. Transfer Masuk ke Balai LLAJSDP Sulawesi Tengah
Satker Perhubungan Darat Sulawesi Selatan sesuai dengan BASTO Nomor KU.003/BA.171/V/HUBDAT-SULSEL/2017 tanggal 8 Mei 2017 berupa Rambu-rambu sebanyak 30.652 unit senilai Rp17.258.516.370,-
- d. Transfer Masuk ke Balai LLAJSDP Denpasar
Satker Perhubungan Darat Nusa Tenggara Barat sesuai dengan BASTO Nomor PL.301/01/01/PPD-NTB/2017 tanggal 6 Maret 2017 berupa:
- 1) Rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebanyak 8 unit senilai Rp15.600.748.000,-;
 - 2) Air Conditioning sebanyak 3 buah senilai Rp12.870.000,-;
 - 3) Printer sebanyak 4 buah senilai Rp14.960.000,-;
 - 4) Notebook sebanyak 3 buah senilai Rp44.550.000,-
 - 5) Personal Computer sebanyak 3 unit senilai Rp34.650.000,-;
 - 6) Proyektor Romad Complex sebanyak 1 unit senilai Rp13.420.000,-;
 - 7) Kursi Dorong sebanyak 4 buah senilai

- Rp4.328.500,-;
- 8) Meja Rapat sebanyak 1 buah senilai Rp1.496.000,-;
 - 9) Kursi besi/metal sebanyak 8 buah senilai Rp3.212.000,-;
 - 10) Meja kerja kayu sebanyak 7 buah senilai Rp9.751.500,-;
 - 11) Lemari besi/metal sebanyak 2 buah senilai Rp7.370.000,-;
 - 12) Bangunan halte/ shelter sebanyak 1 unit senilai Rp949.071.000,-.

2. Transfer masuk aset-aset Fasilitas Keselamatan Jalan yang diserahterimakan ke Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a. Balai LLAJSDP Palangkaraya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Mutasi Barang Milik Negara kepada Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat sesuai dengan Nomor PL.301/1/4/BLLAJSDP-PLK/2017 tanggal 8 Pebruari 2017 berupa:

- 1) Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp276.979.000,-
- 2) Video Monitor sebanyak 1 unit senilai Rp2.131.892.000,-

b. Satker Perhubungan Darat Sulawesi Barat sesuai dengan BASTO Nomor BA.110/HUBDAT-SB/IX/2016 tanggal 5 September 2016 berupa:

- 1) Rambu-rambu sebanyak 1.510 buah senilai Rp9.224.177.667,-;
- 2) *Solar cell* sebanyak 285 buah senilai Rp10.854.775.225,-;
- 3) Rambu papan tambahan sebanyak 22 unit senilai Rp11.893.948,-;
- 4) Rambu-rambu peringatan sebanyak 175 unit

senilai Rp275.570.742,-;

- 5) Rambu-rambu petunjuk/ penuntun sebanyak 156 unit senilai Rp334.337.844,-;
- 6) Paku jalan sebanyak 1.412 unit senilai Rp427.873.468,-;
- 7) *Guardrail* sebanyak 1.097 unit senilai Rp5.460.971.106,-

3. Transfer masuk aset-aset Pengadaan Sosialisasi yang diserahkan dari Direktorat Pembinaan Keselamatan ke Balai LLAJSDP

- a. Balai LLAJSDP Jambi sesuai dengan BASTO Nomor KU.003/1/7/DKTD/2014 tanggal 28 April 2014 sebanyak 1 unit pengadaan peralatan sosialisasi senilai Rp733.000.000,-;
- b. Balai LLAJSDP Palangkaraya sesuai dengan BASTO Nomor KU.003/1/5/DKTD/2014 tanggal 28 April 2014 sebanyak 1 unit peralatan sosialisasi senilai Rp739.000.000,-;
- c. Balai LLAJSDP Palu sesuai dengan dengan BASTO Nomor KU.003/1/6/DKTD/2014 tanggal 28 April 2014 sebanyak 1 unit peralatan sosialisasi senilai Rp739.000.000,-

F.5 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN TA. 2016

Temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pada Direktorat Sarana Perhubungan Darat:

1. Penyajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat Belum Memadai.

BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar Dirjen Hubdat menginstruksikan Direktur Sarana Perhubungan Darat untuk meningkatkan pemahaman SDM di lingkungannya dalam pengelolaan PNBP khususnya PNBP

dari uji tipe kendaraan melalui pelatihan-pelatihan berkelanjutan.

Tindaklanjut:

- Ditjen Perhubungan Darat telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada KPA Satker Direktorat Sarana TA. 2016 melalui Surat Sesditjen Perhubungan Darat a.n Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PS.313/I/3/DJPD/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal teguran dan instruksi terhadap Hasil laporan Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 untuk meningkatkan pemahaman SDM dilingkungan dalam pengelolaan PNBP, khusus PNBP dari uji type kendaraan melalui pelatihan-pelatihan berkelanjutan (surat teguran terlampir)
- Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PS.313/1/13/DJPD/2017 kepada Direktur Sarana Hubdat perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dan Manajemen Aset s.d Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Perhubungan.
- Telah dilakukan bimtek terkait peningkatan pemahaman SDM di lingkungannya dalam pengelolaan PNBP khususnya PNBP dari uji tipe kendaraan.

2. Penatausahaan Persediaan pada Empat Satker di Tiga Eselon 1 Kementerian Perhubungan Belum Memadai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat;
- b. Memerintahkan KPA pada Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat untuk melakukan penertiban

terhadap pencatatan dan pengelolaan persediaan dengan melakukan inventarisasi dan pemeriksaan fisik atas persediaan secara berkala.

Tindaklanjut:

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menindaklanjuti dengan membuat Surat teguran tertulis kepada KPA Satker Direktorat Sarana Perhubungan Darat TA. 2016 Nomor PS.313/I/DJPD/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal teguran terhadap Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA. 2016;
- Telah dilakukan penertiban terhadap pencatatan dan pengelolaan persediaan tersebut.

F.6 SELISIH AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA

Pada Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2017 terdapat selisih akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya senilai Rp32.958.114.928,- antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan pada e-rekon tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, hal tersebut dikarenakan adanya aset yang akan diserahkan kepada Masyarakat yang telah direklas masuk ke akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sehingga tidak dikenakan penyusutan terhadap aset tersebut.

F.7 LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA. 2017 POSISI 31 DESEMBER 2017 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

1. Pagu Anggaran

Total Pagu DIPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.272.264.301.000,-

a) Rincian per Sumber Dana:

RM	: Rp4.267.864.077.000,- (99,90%)
PNBP	: Rp4.400.224.000,- (0,10%)

b) Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai : Rp727.134.464.000,- (17,02%)

Belanja Barang : Rp2.224.866.550.000,- (52,08%)

Belanja Modal : Rp1.320.263.287.000,- (30,90%)

2. Pagu Anggaran Setelah Efisiensi dan APBNP

Total Pagu DIPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.001.669.726.000,-

a) Rincian per Sumber Dana:

RM : Rp3.999.269.725.000,- (99,94%)

PNBP : Rp2.400.001.000,- (0,06%)

b) Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai : Rp727.134.464.000,- (18,17%)

Belanja Barang : Rp1.956.349.046.000,- (48,89%)

Belanja Modal : Rp1.318.186.216.000,- (32,94%)

3. Pagu Anggaran Setelah Realokasi Anggaran

Total Pagu DIPA Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.925.065.770.000,-

a) Rincian per Sumber Dana:

RM : Rp3.922.665.769.000,- (99,94%)

PNBP : Rp2.400.001.000,- (0,06%)

b) Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai : Rp650.530.508.000,- (16,57%)

Belanja Barang : Rp2.002.452.144.000,- (51,02%)

Belanja Modal : Rp1.272.083.118.000,- (32,41%)

4. Jumlah Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 72 Satker, terdiri dari:

a) Kantor Pusat : 6 satker

b) Balai LLAJSDP : 5 satker

c) OPP : 4 satker

d) Kantor PP : 3 satker

e) Satker Provinsi : 29 satker

f) BPTD : 25 satker

5. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017 Posisi 31 Desember 2017

Realisasi penyerapan Anggaran setelah Realokasi Anggaran sebesar Rp3.925.065.770.000,- posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.468.641.452.808,- atau sebesar 88,37 persen, terdiri dari:

a) Rincian per Sumber Dana:

RM : Rp3.467.003.457.658,- (88,38%)

PNBP : Rp1.657.445.150,- (69,06%)

b) Rincian per Jenis Belanja:

BELANJA	PAGU	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	650.175.350.000	295.131.593.636	45,39
Belanja Barang	2.002.472.875.000	1.912.771.085.392	95,52
Belanja Modal	1.272.417.545.000	1.260.738.773.780	99,08
Jumlah	3.925.065.770.000	3.468.641.452.808	88,37

6. Kegiatan yang Dikontrakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Total rencana kegiatan yang dikontrakan sebanyak 681 Paket, terdiri dari:

a) Sudah Kontrak : 679 Paket

b) Belum Kontrak : 2 Paket

Keterangan Belum Kontrak :

a) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Selatan berupa Pekerjaan Pengadaan Lampu Suar Darat di Pelabuhan Pamatata senilai Rp540.000.000,- dikarenakan sesuai hasil survey Disnav belum perlu dipasang karena sudah ada rambu.

b) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Utara berupa Pekerjaan Pembangunan Terminal AKAP Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahap I senilai Rp3.000.000.000,- dikarenakan belum ada sertifikat tanah.

7. Kegiatan yang diblokir
- a) Satuan Direktorat Angkutan dan Multimoda sebesar Rp22.574.203.000,- berupa :
- (1) Subsidi Operasional Lintas Penyeberangan Perintis (KMP. Bamega dan KMP. Memberamo-Foja) sebesar Rp1.525.837.000,-
 - (2) Subsidi Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh Lintas Jakarta-Surabaya (Realokasi) sebesar Rp15.652.594.000,-
 - (3) Subsidi Angkutan Penyeberangan Kapal Ro-Ro Lintas Surabaya-Lembar (Realokasi) sebesar Rp4.172.889.000,-
 - (4) Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Lintas Jakarta-Pulau Untung Jawa-Pulau Pramuka sebesar Rp1.222.883.000,-
- b) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat berupa Pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong sebesar Rp37.336.000,-
- c) Satuan Kerja Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Utara berupa Pekerjaan Pembangunan Terminal AKAP Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahap I sebesar Rp3.000.000.000,- disebabkan belum adanya sertifikat tanah.
8. Realisasi Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp456.424.317.192,-
- a) Belanja Pegawai sebesar Rp355.043.756.364,-
- (1) Belanja Pegawai Transito sebesar Rp43.874.556.000,-
 - (2) Sisa Belanja Gaji Pokok Rp134.665.711.855,-
 - (3) Sisa Belanja Tunjangan Rp75.039.936.752,-
 - (4) Sisa Belanja Uang Makan Rp10.694.464.065,-
 - (5) Sisa Belanja uang lembur Rp61,176,632,000,-
 - (6) Sisa Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/

Kegiatan) Rp29.592.455.692,-

- b) Belanja Barang sebesar Rp89.701.789.608,-
 - (1) Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp922.706.000,- terdiri dari:
 - (a) Kegiatan *Surveillance* ISO Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi sebesar Rp32.706.000,-;
 - (b) Kegiatan Kontigensi Bencana senilai Rp200.000.000,- dan
 - (c) DAK senilai Rp150.000.000 pada Balai LLAJSDP Jambi; dan
 - (d) Pengadaan Lampu Suar darat di Pelabuhan Pamatata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp540.000.000,- dikarenakan sesuai hasil survey Disnav belum perlu dipasang karena sudah ada rambu.
 - (2) Sisa Kontrak sebesar Rp60.910.799.608,-
 - (3) Blokir sebesar Rp22.574.203.000,-
 - (4) Sisa belanja barang operasional dan nonoperasional lainnya (listrik, air, telepon, ATK perjalanan dinas dan honor) sebesar Rp5.294.081.000,-
- c) Belanja Modal sebesar Rp11.678.771.220,-
 - (1) Kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp207.482.000,- pada Pengadaan Inventaris Kantor Balai Bekasi
 - (2) Sisa Kontrak sebesar Rp8.348.580.000,-
 - (3) Blokir sebesar Rp3.037.336.000,-
 - (4) Sisa Belanja Modal sebesar Rp85.373.000,- supervisi pengadaan perlengkapan jalan Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku sebesar Rp48.000.000,- dan Supervisi pengadaan Faskes Kambua-susumuk Satker Perhubungan Darat Provinsi Papua Barat Rp37.372.500,-

F.8 JURNAL TIDAK LAZIM

Berdasarkan analisa e-rekon tingkat eselon I pada Laporan Keuangan TA. 2017 *Audited* Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdapat Jurnal Tidak Lazim, dimana jurnal tersebut diakibatkan adanya beberapa transaksi yang membutuhkan jurnal seperti pembebanan beban ekstrakomptabel, kesalahan penganggaran, adanya hibah masuk dan koreksi/penyesuaian satker inaktif yang memiliki

saldo, adapun rincian transaksi tersebut sebagaimana terlampir dalam lampiran Catatan atas Laporan Keuangan ini.

F.9 PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN UNTUK ASET YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Berdasarkan hasil audit BPK RI, penyesuaian perlakuan akuntansi akun persediaan untuk aset yang diserahkan ke Pemerintah Daerah yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan untuk persediaan berupa aset yang sudah terbit BASTO dan sudah sesuai dengan nilai yang tercatat pada SIMAK-BMN;
2. Untuk semua konstruksi dalam pengerjaan yang akan di serahkan ke Pemerintah Daerah/masyarakat di catat sebagai persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
LAMPIRAN II	KOREKSI PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
LAMPIRAN III	KESESUAIAN KOREKSI HASIL PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA DALAM LAPORAN KEUANGAN
LAMPIRAN IV	CATATAN ATAS TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
LAMPIRAN V	CATATAN ATAS TRANSAKSI 221 (BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN)
LAMPIRAN VI	RINCIAN HIBAH TANAH
LAMPIRAN VII	RINCIAN TRANSFER MASUK - TRANSFER KELUAR
LAMPIRAN VIII	RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN
LAMPIRAN IX	RINCIAN KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI
LAMPIRAN X	RINCIAN PERSEDIAAN YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
LAMPIRAN XI	RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
LAMPIRAN XII	RINCIAN ASET TAK BERWUJUD
LAMPIRAN XIII	LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNG
LAMPIRAN XIV	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SALDO SATKER INAKTIF
LAMPIRAN XV	BUKTI SETOR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
LAMPIRAN XVI	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TERKAIT P3D
LAMPIRAN XVII	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TERKAIT LIKUIDASI
LAMPIRAN XVIII	REKENING KORAN PER 31 DESEMBER 2017

PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

No	Uraian Akun	Nilai Buku				Nilai Wajar	Kenaikan / (Penurunan)
		Jumlah	Administrasi	Jumlah	Inventarisasi		
1.	Tanah	973.760 M ²	480.917.360.575	973.600 M ²	480.751.264.565	1.046.461.961.000	565.544.600.425
2.	Bangunan	205.887 M ²	446.421.260.031	825.359 M ²	438.610.494.149	2.206.880.197.000	1.760.458.936.969
3.	Jalan, Jembatan, Bangunan Air	15.917 M ²	356.856.805.831	1.146.343 M ²	361.161.236.713	3.137.266.253.000	2.780.409.447.169
JUMLAH		1.195.564.M²	1.284.195.426.437	2.945.302 M²	1.280.522.995.427	6.390.608.411.000	5.106.412.984.563

KOREKSI PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

No	Uraian Akun	Nilai Koreksi dalam Aplikasi SIMAK BMN					Total
		120	121	205	221	321	
1.	Tanah			565.710.696.435	(166.096.010)		565.544.600.425
2.	Bangunan	4.421.402.000		1.763.848.300.851	(3.534.454.402)	(4.276.311.480)	1.760.458.936.969
3.	Jalan, Jembatan, Bangunan Air		1.018.169.400	2.780.177.693.887	(786.416.118)		Koreksi2.780.409.447. 169
JUMLAH		4.421.402.000	1.018.169.400	5.109.736.691.173	(4.486.966.530)	(4.276.311.480)	5.106.412.984.563

LAMPIRAN III

KESESUAIAN KOREKSI HASIL PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA DALAM LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian Akun	Aplikasi SIMAK BMN				
		120	121	205	321	Total
1.	Tanah			565.710.696.435		565.710.696.435
2.	Bangunan	4.421.402.000		1.763.848.300.851	(4.276.311.480)	1.763.993.391.371
3.	Jalan, Jembatan, Bangunan Air		1.018.169.400	2.780.177.693.887		2.781.195.863.287
JUMLAH		4,421,402,000	1,018,169,400	5,109,736,691,173	(4,276,311,480)	5,110,899,951,093

No.	Uraian Akun	Aplikasi SAIBA		
		391114	391116	Total
1.	Tanah	565,710,696,435	-	565,544,600,425
2.	Bangunan	1,763,848,300,851	145,090,520	1,763,993,391,371
3.	Jalan, Jembatan, Bangunan Air	2,780,177,693,887	1,018,169,400	2,781,195,863,287
JUMLAH		5,109,736,691,173	997,163,910	5,110,899,951,093
SELISIH				-

CATATAN ATAS TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

No	Uraian Akun	Nilai Buku		Transaksi Koreksi Dalam SIMAK BMN		
		Jumlah	Administrasi	221	321	Lainnya
1,	Tanah	1	166,096,010	(166,096,010)		
2,	Bangunan	17	7,810,765,882	(3,534,454,402)	(4,276,311,480)	
3,	Jalan, Jembatan, Bangunan Air	7	786,416,118	(786,416,118)		
Total		25	8,763,278,010	(4,486,966,530)	(4,276,311,480)	

Terhadap BMN yang tidak ditemukan yang telah dilakukan koreksi dalam aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi 221 (transaksi BMN tidak ditemukan), yang telah ditindak lanjuti dengan penghapusbukuan adalah sebesar Rp166,096,010,- yang dilakukan melalui transaksi 301.

CATATAN ATAS TRANSAKSI 221 (BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN)

PENJELASAN ATAS TINDAK LANJUT TRANSAKSI 221 (BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN)

Sesuai dengan hasil reuiu antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan atas Transaksi 221 (Barang yang tidak ditemukan) hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB Bekasi) 20 NUP senilai Rp.1.618.268.582
 - a. Pengembangan (kesalahan pencatatan) sebanyak 8 NUP senilai Rp.898.669.758
 - b. Proses Penghapusan 12 NUP senilai Rp.719.598.834
2. Pelabuhan Penyeberangan Kariangu 4 NUP senilai Rp.2.868.697.948
 - a. Pengembangan (kesalahan pencatatan) sebanyak 4 NUP senilai Rp.2.868.697.948

Atas justifikasi sebagaimana diatas, sesuai rekomendasi dari Tim BPK RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanah	Identitas BMN					Barang Tidak Ditemukan (221)	Rincian Pekerjaan	Tindak Lanjut					Tindak Lanjut Pada Aplikasi SIMAK Tahun 2018 (Sesuai Rekomendasi BPK)	
	Nomor Urut	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Luas			Lokasi	Masih Ditelusuri	Pengembangan (Salah Pencatatan)	Proses Penghapusan/RB/ Sudah Dibongkar	Dialihkan Kepada Pihak Lain		Tidak Ditemukan
1	02203020002 5734000KP	2010104001	3	160 m	BPLJSKB	166.096.010	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH			166.096.010				akan dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sampai terbit SK penghapusan untuk di hapuskan dari pencatatan
Total						166.096.010				166.096.010				

Bangunan														
Nomor Urut	Identitas BMN					Barang Tidak Ditemukan (221) nilai perolehan	Rincian Pekerjaan	Tindak Lanjut						Tindak Lanjut Pada Aplikasi SIMAK Tahun 2018 (Sesuai Rekomendasi BPK)
	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Luas	Lokasi			Masih Ditelusuri	Pengembangan (Salah Pencatatan)	Proses Penghapusan/RB/ Sudah Dibongkar	Dialihkan Kepada Pihak Lain	Tidak Ditemukan	Lainnya	
1	02203020002 5734000KP	4010101001	3		BPLJSKB		BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN (SPBU)			1				akan dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sampai terbit SK penghapusan untuk dihapuskan dari pencatatan SIMAK BMN
2	02203020002 5734000KP	4010101001	4		BPLJSKB	17.171.000	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN		14.423.640					akan dkapitalisasi ke bangunan utama sesuai dari KPKNL Posisi Oktober 2017
3	02203020002 5734000KP	4010103001	1		BPLJSKB	138.000.000	BANGUNAN BENGKEL/HANGGAR PERMANEN (PRESS)			94.258.926				akan di lakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dan selanjutnya akan dilakukan penghapusan sesuai dengan SK Dirjen Darat No.SK.1129/PL.404/DJP D/2018
	02203020002 5734000KP	4010105001	1			516.982.507	BANGUNAN GEDUNG LABORTORIUM PERMANEN (WORKSHOP)			353.117.519				
4	02203020002 5734000KP	4010106010	1		BPLJSKB	17.988.477	BANGUNAN KLINIK/PUSKESMAS			17.988.477				akan di lakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dan selanjutnya akan dilakukan penghapusan sesuai dengan SK Dirjen Darat No.SK.1129/PL.404/DJP D/2018
	02203020002 5734000KP	4010114001	1			30.661.241	GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN			30.661.241				

Bangunan														
Nomor Urut	Identitas BMN					Barang Tidak Ditemukan (221) nilai perolehan	Rincian Pekerjaan	Tindak Lanjut						Tindak Lanjut Pada Aplikasi SIMAK Tahun 2018 (Sesuai Rekomendasi BPK)
	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Luas	Lokasi			Masih Ditelusuri	Pengembangan (Salah Pencatatan)	Proses Penghapusan/RB/ Sudah Dibongkar	Dialihkan Kepada Pihak Lain	Tidak Ditemukan	Lainnya	
5	02203020002 5734000KP	4010113001	1		BPLJSKB	11.000.000	GEDUNG POS JAGA PERMANEN			7.513.394				akan dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sampai terbit SK penghapusan untuk di keluarkan dari pencatatan SIMAK BMN
	02203020002 5734000KP		2					7.513.395						
	02203020002 5734000KP		3					7.513.396						
	02203020002 5734000KP		4					7.513.397						
	02203020002 5734000KP		5					7.513.398						
6	02203020002 5734000KP	4010113002	2		BPLJSKB	24.280.096	GEDUNG POS JAGA SEMI PERMANEN			19.909.680				akan dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sampai terbit SK penghapusan untuk di keluarkan dari pencatatan SIMAK BMN
7	02203020002 5734000KP	4010105001	11			379.000.000	BANGUNAN GEDUNG LABORTORI UM PERMANEN		306.990.000					akan dikapitalisasi ke bangunan utama
Total						1.135.083.321			321.413.640	553.502.824				

Jalan, Jaringan dan Bangunan Air														
Nomor Urut	Identitas BMN					Barang Tidak Ditemukan (221) (nilai perolehan)	Rincian Pekerjaan	Tindak Lanjut						Tindak Lanjut Pada Aplikasi SIMAK Tahun 2018 (Sesuai Rekomendasi BPK)
	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Luas	Lokasi			Masih Ditelusuri	Pengembangan (Salah Pencatatan)	Proses Penghapusan/RB/ Sudah Dibongkar	Dialihkan Kepada Pihak Lain	Tidak Ditemukan	Lainnya	
1	02203020002 5734000KP	5010209002	2		BPLJSKB	34.584.000	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS KOMPLEKS		29.050.560					akan dikapitalisasi ke bangunan utama (NUP 1 jembatan kelas 4)
			3			549.348.000			461.452.320					
			4			16.973.000			14.257.320					
2	02203020002 5734000KP	5010109001	2		BPLJSKB	76.834.500	JALAN KHUSUS INSPEKSI		33.746.918					akan dikapitalisasi ke bangunan utama (NUP 1 jembatan kelas 4)
			3			27.800.000			13.900.000				akan dimasukkan sebagai saldo awal, karena untuk NUP 3 dan 4 pada JJBA sudah terkena normalisasi	
			4			49.698.000			24.849.000					
Total						755.237.500			577.256.118					

Gedung dan Bangunan														
Nomor Urut	Identitas BMN					Barang Tidak Ditemukan (221) nilai perolehan	Rincian Pekerjaan	Tindak Lanjut						Tindak Lanjut Pada Aplikasi SIMAK Tahun 2018 (Sesuai Rekomendasi BPK)
	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Luas	Lokasi			Masih Ditelusuri	Pengembangan (Salah Pencatatan)	Proses Penghapusan/RB/ Sudah Dibongkar	Dialihkan Kepada Pihak Lain	Tidak Ditemukan	Lainnya	
1	02203160060 6481000KP	4010104999	1		UPT KARIANGU	1.993.910.000	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI LAINNYA		1.993.910.000					akan dkapitalisasi ke bangunan utama
2	02203160060 6481000KP	4010101001	2		UPT KARIANGU	150.315.020	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/P ELABUHAN/B ANDARA PERMANEN		150.315.020					akan dilakukan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin
3	02203160060 6481000KP	4010103001	3		UPT KARIANGU	515.312.928	BANGUNAN BENGKEL/HANGGAR PERMANEN (PRESS)		515.312.928					akan dilakukan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Renovasi
Total						2.659.537.948			2.659.537.948	000				

Jalan, Jaringan dan Bangunan Air														
Nomor Urut	Identitas BMN					Barang Tidak Ditemukan (221) nilai perolehan	Rincian Pekerjaan	Tindak Lanjut						Tindak Lanjut Pada Aplikasi SIMAK Tahun 2018 (Sesuai Rekomendasi BPK)
	Kode Satker	Kode Barang	NUP	Luas	Lokasi			Masih Ditelusuri	Pengembangan (Salah Pencatatan)	Proses Penghapusan/RB/ Sudah Dibongkar	Dialihkan Kepada Pihak Lain	Tidak Ditemukan	Lainnya	
1	02203160060 6481000KP	4010118001	1		UPT KARIANGU	209.160.000	JEMBATAN TIMBANG		209.160.000					akan dilakukan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin
Total						209.160.000			209.160.000	000				

LAMPIRAN VI

RINCIAN HIBAH TANAH

No	Satker	Uraian	Luas Tanah	Lokasi	Nilai
1	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	980 M2	Kel. Manahan, Banjarsari	2,304,960,000
2	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	765 M2	Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Surakarta	573,750,000
3	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	326 M2	Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Surakarta	70,161,354,000
4	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	683 M2	Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Surakarta	
5	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	373 M2	Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Surakarta	
6	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	2.025 M2	Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Surakarta	
7	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	31.929 M2	Kel. Gilingan, Kec.Banjarsari, Surakarta	
8	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	11.800 M2	Kel. Manahan, Banjarsari	
9	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400 M2	Bobotsari, Purbalingga	12,400,000
10	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.242 M2	Bobotsari, Purbalingga	1,955,599,561
11	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.498 M2	Bobotsari, Purbalingga	232,438,000
12	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	21.033 M2	Banda Raya, Banda Aceh	13,002,115,151
			10.133 M2	Banda Raya, Banda Aceh	
13	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.014 M2	Kejuruan Muda, Seumadam Aceh Timur	80,280,000
14	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	5.600 M2	Jontor, Aceh Singkil	55,000,000
15	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	33.130 M2	Pare-Pare, Sulawesi Selatan	993,900,000
16	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	27.385 M2	Koto Tengah, Padang	8,300,859,745
17	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15.628 M2	Air Haji, Sumbar	199,675,000
18	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.400 M2	Pasaman, Sumbar	80,400,000

No	Satker	Uraian	Luas Tanah	Lokasi	Nilai
19	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.010 M2	Kamang Baru, Sumbar	2,510,000
20	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.400 M2	Batipuh Baruh, Sumbar	209,000,000
21	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.400 M2	Koto Tengah, Padang	427,500,000
22	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.000 M2	Gunung Talang, Sumbar	49,220,000
23	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.400 M2	Tanjung Gadang, Sumbar	60,000,000
24	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.400 M2	Laintau Buo, Sumbar	155,000,000
25	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.900 M2	Lima Puluh Kota, Sumbar	249,701,466
26	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	27.550 M2	Jember, Jawa Timur	6,337,546,000
27	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	28.150 M2	Arjosari. Malang, Jawa Timur	18,860,971,524
28	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	56.359 M2	Bangkalan, Jawa Timur	11,448,179,445
29	Setditjen Hubdat	Tanah Kosong yang sudah di peruntukkan	22.670 M2	Bangkalan, Jawa Timur	4,604,947,355
30	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	1.949 M2	Pacitan, Jawa Timur	487,250,000
31	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	4.533 M2	Pacitan, Jawa Timur	793,275,000
32	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	2.342 M2	Pacitan, Jawa Timur	409,850,000
33	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	2.694 M2	Pacitan, Jawa Timur	1,297,330,597
34	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	5.712 M2	Pacitan, Jawa Timur	2,250,528,000
35	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.015 M2	Kulon Progo, DIY	1,505,625,000
36	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.211 M2	Sleman, DIY	4,628,051,700
37	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.733 M2	Sleman, DIY	5,634,577,000
38	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	50.369 M2	Demak	13,953,969,600
39	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	25.090 M2	Sumbawa, NTB	7,928,440,000

No	Satker	Uraian	Luas Tanah	Lokasi	Nilai
40	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.940 M2	Kintap, Kalimantan Selatan	1,998,800,000
41	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.400 M2	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	240,000,000
42	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	60.710 M2	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	1,518,000,000
43	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.000 M2	Mesuji, Lampung	12,500,000
44	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.460 M2	Way Kanan, Lampung	12,500,000
45	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	19.620 M2	Lampung Selatan, Lampung	18,000,000
46	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	37.240 M2	Cirebon, Jawa Barat	29,792,000,000
47	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	44.456 M2	Kota Jambi, Jambi	9,792,000,000
48	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	7.270 M2	Samarinda, Kalimantan Timur	3,903,990,000
49	Setditjen Hubdat	Tanah Bangunan Terminal Darat	3.740 M2	Pekanbaru, Riau	3,072,540,000
TOTAL					229,606,534,144

LAMPIRAN VII**RINCIAN TRANSFER MASUK**

NO.	JENIS	ENTITAS ASAL	NILAI
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERA BARAT	(1,467,360,498)
2	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERA BARAT	20,543,047,000
3	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI RIAU	35,384,594,000
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI RIAU	(3,538,459,400)
5	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI BANGKA BELITUNG	9,534,427,500
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI BANGKA BELITUNG	(681,030,535)
7	Gedung dan Bangunan	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,134,268,400
8	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	13,932,459,997
9	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	(162,038,158)
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	(1,990,352,038)
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI NTB	(18,981,420)
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI NTB	(2,634,199,452)
13	Gedung dan Bangunan	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI NTB	949,071,000
14	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI NTB	15,747,356,000
15	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	15,907,136,600
16	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(1,136,224,194)
17	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI KALTIM	21,545,430,000
18	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI KALTIM	(3,123,956,400)
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	(3,451,703,074)
20	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESI SELATAN	17,258,516,370
21	Gedung dan Bangunan	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESI BARAT	5,460,971,106
22	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESI BARAT	(1,540,133,831)
23	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESI BARAT	(390,069,371)

NO.	JENIS	ENTITAS ASAL	NILAI
24	Peralatan dan Mesin	SATUAN KERJA PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESI BARAT	21,128,628,894
25	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN	(422,285,713)
26	Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN	739,000,000
27	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN	(369,499,999)
28	Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN	739,000,000
29	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN	(418,857,142)
30	Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN	733,000,000
31	Gedung dan Bangunan	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	595,485,000
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(5,252,856,985)
33	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	18,488,324,400
34	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(170,138,570)
35	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(698,920,242)
36	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2,408,871,000
37	Aset Tak Berwujud Lainnya	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	691,155,500
TOTAL			175,453,675,745

RINCIAN TRANSFER KELUAR

NO	JENIS	ENTITAS TUJUAN	NILAI
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	(1,467,360,498)
2	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	20,543,047,000
3	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	35,384,594,000
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	(3,538,459,400)
5	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	9,534,427,500
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	(681,030,535)
7	Gedung dan Bangunan	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	1,134,268,400
8	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	13,932,459,997
9	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	(162,038,158)
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	(1,990,352,038)
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DENPASAR DI PROVINSI BALI	(18,981,420)
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DENPASAR DI PROVINSI BALI	(2,634,199,452)
13	Gedung dan Bangunan	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DENPASAR DI PROVINSI BALI	949,071,000
14	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DENPASAR DI PROVINSI BALI	15,747,356,000
15	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	15,907,136,600
16	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	(1,136,224,194)
17	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	21,545,430,000
18	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	(3,123,956,400)

NO	JENIS	ENTITAS TUJUAN	NILAI
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN PALU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	(3,451,703,074)
20	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN PALU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	17,258,516,370
21	Gedung dan Bangunan	DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	5,460,971,106
22	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	(1,540,133,831)
23	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	(390,069,371)
24	Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	21,128,628,894
25	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN PALU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	(422,285,713)
26	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN PALU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	739,000,000
27	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	(369,499,999)
28	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	739,000,000
29	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	(418,857,142)
30	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN JAMBI DI PROVINSI JAMBI	733,000,000
31	Gedung dan Bangunan	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	595,485,000
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	(5,252,856,985)
33	Peralatan dan Mesin	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	18,488,324,400
34	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	(170,138,570)
35	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	(698,920,242)
36	Peralatan dan Mesin	DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	2,408,871,000
37	Aset Tak Berwujud Lainnya	BALAI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALANGKARAYA DI PROVINSI KALIMANTAN T	691,155,500
TOTAL			175,453,675,745

RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN

KODE	UNIT KERJA	NILAI
447548	PENGEMBANGAN SARANA LLASDP MALUKU	(16,256,225,888.)
466652	PENGEMBANGAN LLAJ SUMATERA BARAT	(1,780,289,000.)
466668	PENGEMBANGAN LLAJ JAMBI	(101,220,950.)
466699	PENGEMBANGAN LLAJ BENGKULU	(519,760,313.)
466756	PENGEMBANGAN LLAJ JAWA TIMUR	(575,190,000.)
466762	PENGEMBANGAN LLAJ BALI	(1,391,696,428.)
466807	PENGEMBANGAN LLAJ KALIMANTAN TENGAH	(1,163,113,188.)
466822	PENGEMBANGAN LLAJ KALIMANTAN TIMUR	(3,686,009,600.)
466869	PENGEMBANGAN LLAJ SULAWESI TENGGARA	(662,907,144.)
466875	PENGEMBANGAN LLAJ SULAWESI SELATAN	(2,380,201,000.)
466881	PENGEMBANGAN LLAJ SULAWESI BARAT	(790,260,000.)
46689	PENGEMBANGAN LLAJ MALUKU UTARA	(773,900,000.)
466972	PENGEMBANGAN LLASDP SUMATERA UTARA	(9,312,443,855.)
466988	PENGEMBANGAN LLASDP SUMATERA BARAT	(4,458,094,668.)
466994	PENGEMBANGAN LLASDP RIAU	(3,193,334,190.)
467008	PENGEMBANGAN LLASDP RIAU KEPULAUAN	(2,823,959,050.)
467039	PENGEMBANGAN LLASDP SUMATERA SELATAN	(6,505,199,580.)
467051	PENGEMBANGAN LLASDP BENGKULU	(8,809,662,000.)
46706	PENGEMBANGAN LLASDP JAWA TENGAH	(30,475,726,388.)
467082	PENGEMBANGAN LLASDP JAWA TIMUR	(39,067,563,841.)
467091	PENGEMBANGAN LLASDP BALI	(1,805,638,450.)
467133	PENGEMBANGAN LLASDP KALIMANTAN BARAT	(3,792,678,250.)
467158	PENGEMBANGAN LLASDP KALIMANTAN SELATAN	(15,900,528,500.)
467164	PENGEMBANGAN LLASDP KALIMANTAN TIMUR	(27,379,545,848.)
46717	PENGEMBANGAN LLASDP SULAWESI UTARA	(27,162,870,561.)
467215	PENGEMBANGAN LLASDP SULAWESI SELATAN	(2,794,799,400.)
467246	PENGEMBANGAN LLASDP MALUKU UTARA	(23,581,891,966.)
467252	PENGEMBANGAN LLASDP MALUKU	(20,350,360,000.)
467597	PENGEMBANGAN LLASDP LAMPUNG	(4,069,554,772.)
445526	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SDP	261,564,624,830.
TOTAL		0.

RINCIAN KOREKSI ASET TETAP NON REVALUASI

Unit Kerja	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	ASET TAK BERWUJUD	Total
BPLJSKB Bekasi	-	-	-	-	-	-
Satker Perhubungan Darat Prov. Riau	-	(15.400)	-	-	-	(15.400)
Satker Perhubungan Darat Prov. Sumsel	-	4.525.287	2.512.200	-	-	7.037.487
Satker Perhubungan Darat Prov. Bengkulu	-	3.288.710.180	-	-	-	3.288.710.180
Satker Perhubungan Darat Prov. Lampung	-	13.566.603	-	-	-	13.566.603
Satker Perhubungan Darat Prov. Banten	-	(575.859.145)	-	-	-	(575.859.145)
Satker Perhubungan Darat Prov. Jawa Tengah	-	(2.900.100)	-	-	-	(2.900.100)
Satker Perhubungan Darat Prov. Kalimantan Timur	-	-	-	(57.857.100.350)	-	(57.857.100.350)
Satker Perhubungan Darat Prov. Sulawesi Utara	-	2.552.317	-	-	-	2.552.317
Satker Perhubungan Darat Prov. Maluku Utara	-	(42.670.800)	-	-	-	(42.670.800)
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	-	7.358.651.718	(194.530.260.911)	3.066.974.204	-	(184.104.634.989)
Direktorat Angkutan dan Multimoda	-	(88.814.391.431)	-	-	-	(88.814.391.431)
Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	-	455.710.416	-	-	-	455.710.416
BLLAJSDP Jambi	-	(8.657.215.428)	-	-	-	(8.657.215.428)
BLLAJSDP Palangkaraya	-	3.420.614.265	-	-	-	3.420.614.265
BLLAJSDP Palu	-	1.045.549.059	-	-	-	1.045.549.059
Pelabuhan Penyeberangan Kariangu	-	(249.000.000)	-	3.054.508.200	-	2.805.508.200
OPP merak	-	9.550.000	-	-	-	9.550.000
OPP Gilimanuk	-	395.001	-	-	(2.932.642.680)	(2.932.247.679)
OPP Lembar	-	723.619.388	-	-	-	723.619.388
Jumlah	-	(82.018.608.070)	(194.527.748.711)	(51.735.617.946)	(2.932.642.680)	(331.214.617.407)

